

"ANALISIS INTENSITAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN JALAN USAHA TANI DI DESA TETEHOSI AFIA KECAMATAN GUNUNGSITOLI UTARA"

by Zega Handrianus

Submission date: 05-Oct-2023 10:20PM (UTC-0400)

Submission ID: 2187076316

File name: cek_turnitin_Bab_I-V.docx (311K)

Word count: 13711

Character count: 91775

**ANALISIS INTENSITAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT¹¹
DALAM PEMBANGUNAN JALAN USAHA TANI
DI DESA TETEHOSI AFIA KECAMATAN
GUNUNGSITOLI UTARA**

SKRIPSI



Oleh

HANDRIANUS ZEGA

NIM. 2319204

PROGRAM STUDI MANAJEMEN

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NIAS

2023

**ANALISIS INTENSITAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT¹¹
DALAM PEMBANGUNAN JALAN USAHA TANI
DI DESA TETEHOSI AFIA KECAMATAN
GUNUNGSITOLI UTARA**

SKRIPSI



Diajukan kepada :
Universitas Nias
Untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan
Program sarjana ekonomi

Oleh

HANDRIANUS ZEGA
NIM. 2319204

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NIAS
2023**



**YAYASAN PERGURUAN TINGGI NIAS
UNIVERSITAS NIAS
FAKULTAS EKONOMI**

Alamat: Jalan karet No.30 Kelurahan Ilir, Kec.Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli
Homepage:<http://mnj.unias.ac.id> email: mnj@unias.ac.id

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul Analisis Intensitas Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Jalan Usaha Tani di Desa Tetelesi Afia Kecamatan Gunungsitoli Utara disusun oleh Handrianus Zega dengan NIM. 2319204 Program Studi Manajemen, telah dikoreksi dan direvisi oleh pembimbing sehingga dapat dilanjutkan untuk sidang ujian skripsi.

Gunungsitoli, September 2023

Dosen Pembimbing

Eliagus Telaumbanua, S.E., M.M
NIDN. 0116088102



YAYASAN PERGURUAN TINGGI NIAS
UNIVERSITAS NIAS
FAKULTAS EKONOMI

Alamat: Jalan karet No.30 Kelurahan Ilir, Kec.Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli
Homepage:<http://mnj.unias.ac.id> email: mnj@unias.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Handrianus Zega
NIM : 2319204
Program : Sarjana
Program Studi : Manajemen

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

- (1) Skripsi/tugas akhir yang segera diujikan adalah benar-benar pekerjaan saya sendiri (bukan jiblanan) dan belum pernah dipergunakan atau dipublikasikan untuk keperluan lain oleh siapa pun;
- (2) Semua sumber yang saya gunakan telah saya cantumkan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (3) Apabila dikemudian hari terbukti/dapat dibuktikan bahwa skripsi/Tugas Akhir ini hasil jiblanan, maka saya menanggung risiko diperkarakan oleh Universitas Nias.

Demikian surat pernyataan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gunungsitoli, September 2023

Yang Menyatakan

Handrianus Zega
NIM. 2319173

© Hak Cipta Milik Universitas Nias, Tahun 2023
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan Universitas Nias.

Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun tanpa izin Universitas Nias.

ABSTRAK

11

Zega, Handrianus 2023. Analisis Intensitas Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Jalan Usaha Tani di Desa Tetelesi Afia Kecamatan Gunungsitoli Utara. Skripsi. Program Manajemen. Universitas Nias. Pembimbing Eliagus Telaumbanua, SE.,M.M.

Intensitas pemberdayaan masyarakat dalam proyek pembangunan merujuk pada tingkat atau derajat di mana suatu masyarakat diberdayakan atau memberdayakan dirinya sendiri secara aktif dalam mengelola sumber daya, mengambil keputusan, dan mengambil bagian dalam proses pembangunan. Penelitian ini, bertujuan untuk mengetahui Intensitas Pemberdayaan Masyarakat dan mekanisme proyek serta solusi yang dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat yang tidak terlibat terkait pembangunan Jalan Usaha Tani di Desa Tetelesi Afia Kecamatan Gunungsitoli Utara. Jenis penelitian ini, dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk mendapatkan informasi, peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada Narasumber yakni informan Kunci, informan Utama dan informan pendukung yang terdiri dari coding informan 1-7.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: Intensitas pemberdayaan masyarakat lokal di dusun Iv desa tetelesi afia kecamatan gunungsitoli utara sangat rendah. dapat dilihat dari rendahnya jumlah harian tenaga kerja setempat terutama pemilik lahan yakni: ada yang 2 hari, 3 hari dan seminggu, dari kurang lebih 6 bulan masa proses pembangunan sedangkan tenaga kerja luar daerah tetap bekerja sampai selesai, serta kurangnya komunikasi dan koordinasi yang baik dari pihak kontraktor pelaksana kepada ketua kelompok tani selaku yang mengusulkan pembangunan jalan usaha tani tersebut.

Mekanisme Pembangunan jalan usaha tani di dusun Iv desa tetelesi afia kecamatan Gunungsitoli utara, awalnya berasal dari dana APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah kota, bukan dari dana desa. Sebelum terjadinya proses pembangunan, telah dilaksanakan musyawarah terlebih dahulu, yang dihadiri oleh pihak pemerintah terkait, ketua kelompok tani terkait, pihak masyarakat pemilik lahan, masyarakat setempat dan pihak Kontraktor Pelaksana sehingga menghasilkan beberapa kesepakatan yang telah disepakati bersama. Namun pada kenyataannya kesepakatan tersebut tidak dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana. dapat dibuktikan pada saat di mulai pembangunan, hal yang terjadi yakni: Minimnya pemberdayaan masyarakat lokal dan mengutamakan tenaga kerja luar daerah, Perubahan jalur jalan usaha tani yang tidak sesuai dengan jalur yang telah dihibahkan, fasilitas mobil pengangkut dan material sirtu yang dimiliki masyarakat sekitar lokasi pembangunan tidak dimanfaatkan oleh kontraktor pelaksana. akibatnya, terjadi aksi protes dan perlawanan dari masyarakat yang meminta biaya ganti rugi atas lahan yang dibangun karena tidak sesuai dengan jalur utama pada surat hibah, jalur jalan menuju lokasi pembangunan tersebut dihalang oleh masyarakat dengan meletakkan batu, adanya surat laporan pengaduan dari masyarakat kepada pihak pemerintah dan pihak berwajib, dan terkait semua permasalahan yang terjadi dilapangan mengakibatkan proses pembangunan berlangsung lama, sekitar kurang lebih 6 bulan yang artinya melebihi target penyelesaian secara umum.

Pemerintah dalam menyikapi permasalahan pembangunan tersebut adalah memberikan surat panggilan kepada pihak masyarakat yang meletakkan batu pada jalur jalan menuju lokasi pembangunan, selanjutnya turun lapangan langsung untuk melihat keadaan yang terjadi di lokasi pembangunan serta membawa satpol pp untuk memindahkan batu yang menghalangi jalur jalan pembangunan tersebut, dan melaksanakan rapat bersama masyarakat pemilik lahan sehingga kontraktor pelaksana melanjutkan kembali pembangunan dengan memberdayakan tenaga kerja lokal walaupun tidak berlangsung lama dan tetap menggunakan tenaga kerja luar daerah hingga selesai.

Kata Kunci : Intensitas pemberdayaan masyarakat, Partisipasi, Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

ABSTRACT

Zega, Handrianus 2023. Analysis of the Intensity of Community Empowerment in the Construction of Farm Business Roads in Tetehosi Afia Village, North Gunungsitoli District. Thesis. Management Program. Nias University. Supervisor Eliagus Telaumbanua, SE.,M.M.

The intensity of community empowerment in a development project refers to the degree or degree to which a community is empowered or empowers itself actively in managing resources, making decisions, and taking part in the development process. This study aims to determine the Intensity of Community Empowerment and the mechanism of projects and solutions carried out in empowering people who are not involved in the construction of Farm Business Roads in Tetehosi Afia Village, North Gunungsitoli District. This type of research is carried out with qualitative descriptive methods with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. To obtain information, researchers conducted interviews directly with resource persons, namely key informants, main informants and supporting informants consisting of coding informants 1-7

Based on the results of the study, it can be concluded that: The intensity of local community empowerment in hamlet IV, Tetehosi Afia village, North Gunungsitoli sub-district is very low. It can be seen from the low daily number of local workers, especially land owners, namely: there are 2 days, 3 days and a week, from approximately 6 months of the construction process while workers outside the region continue to work until completion, as well as the lack of good communication and coordination from the implementing contractor to the head of the farmer group as the one who proposed the construction of the farm business road.

The mechanism for the construction of agricultural business roads in hamlet IV of Tetehosi Afia village, North Gunungsitoli District, initially came from Regional Budget APBD funds implemented by the city government, not from village funds. Prior to the development process, deliberation had been carried out first, which was attended by the relevant government, heads of related farmer groups, land-owning communities, local communities and implementing contractors so as to produce several mutually agreed agreements. But in reality the agreement was not implemented by the executing contractor. It can be proven that when construction starts, things that happen are: The lack of empowerment of local communities and prioritizing workers outside the region, Changes in agricultural business roads that are not in accordance with the routes that have been granted, transportation car facilities and sirtu materials owned by the community around the construction site are not used by the implementing contractor. As a result, there were protests and resistance from the community who asked for compensation costs for the land built because it was not in accordance with the main route on the grant, the road path to the construction site was blocked by the community by laying stones, there was a complaint report letter from the community to the government and the authorities, and related to all problems that occurred in the field resulted in a long development process, About approximately 6 months which means exceeding the general completion target.

The government in responding to the development problem is to give a summons to the community who put stones on the road path to the construction site, then go to the field directly to see the conditions that occur at the construction site and bring the police force to remove the stones that block the development road path, and hold meetings with the land-owning community so that the implementing contractor continues construction By empowering local workers even though it does not last long and still using workers outside the region until completion.

Keywords : Community empowerment intensity, Participation, Rural Infrastructure Development

KATA PENGANTAR

Ucapan syukur yang tak terhingga kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas penyertaan-Nya kepada peneliti, sehingga penyusunan Skripsi ini yang berjudul: **Analisis Intensitas Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Jalan Usaha Tani di Desa Tetelesi Afia Kecamatan Gunungsitoli Utara**, dapat terselesaikan dengan baik. Beragam kendala yang Peneliti hadapi, namun tidak menjadi halangan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. oleh karena itu peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya, kepada pihak yang telah membantu, yakni :

1. Bapak Eliyunus Waruwu, S.Pt.,M.Si. Sebagai Pj. Rektor Universitas Nias.
2. Ibu Maria Magdalena Bate'e, S.E.,M.M. Sebagai Plt. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Nias.
3. Bapak Dr. Ayler B. Ndraha, S.STP.,M.Si, selaku Plt Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) di Universitas Nias yang selalu setia melayani penulis untuk persiapan berkas yang berhubungan dengan penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Yupiter Mendrofa, S.E.,M.M, selaku Ketua Program Studi S1 Manajemen.
5. Bapak Eliagus Telaumbanua, S.E.,M.M sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan waktu bimbingan dan arahan selama penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen di Universitas Nias atas semua ilmu yang telah diberikan kepada peneliti.
7. Staf administrasi untuk bantuannya selama peneliti melakukan studi di Universitas Nias.
8. Teristimewa kepada kedua orang tua saya, yang sangat saya banggakan, yang tiada henti-henti memberikan doa, dukungan, dan cinta kasih kepada saya. Terimakasih buat pengorbanan dan jerih payah kedua orang tua saya hingga saya bisa sampai pada tahap ini, dan kepada saudara saya, adik-adik saya, yang selalu memberikan dukungan kepada saya.

9. Seluruh teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan dukungan, bantuan, dan motivasi, dalam penyelesaian skripsi ini, dan pihak lain yang tidak saya sebut satu per satu.

Semoga Tuhan yang selalu membalas semua kebaikan kepada semua pihak yang telah turut mendukung penyelesaian pendidikan sarjana ini. Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, baik dari segi penyajian materi maupun dalam bahasa penyampaiannya, apabila nanti terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, peneliti mengharapkan kritik dan sarannya.

Peneliti berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi seluruh pembaca dan khususnya bagi mahasiswa Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Nias.

Akhir kata peneliti ucapkan Terimakasih. YA'AHOWU!!

Gunungsitoli, Oktober 2023

peneliti,

Handrianus Zega
NIM. 2319204

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penduduk Indonesia yang berdomisili di daerah pedesaan pada umumnya mayoritas mata pencaharian disektor pertanian. Sektor pertanian merupakan sektor yang strategis dalam perekonomian nasional untuk kelangsungan hidup masyarakat, sebagai penyedia lapangan kerja, dan penyediaan pangan dalam negeri. Pembangunan ekonomi di sektor pertanian mempunyai peranan yang sangat penting dalam perkembangan ekonomi, karena memberi sumbangan lebih besar dalam peningkatan kesejahteraan dan pembangunan nasional. Untuk itu pemerintah melakukan berbagai cara untuk mendorong sektor pertanian agar dapat tumbuh lebih pesat lagi serta menjadi motor penggerak ekonomi Indonesia, dikutip dari perkataan Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada rapat terbatas (Ratas) tentang Akselerasi penguatan ekonomi sektor Pertanian dan Perikanan, di Kantor Presiden, Jakarta, (Pemerintahan, 2019).

Sebagai bentuk upaya pemerintah dalam mendukung sektor pertanian, maka pemerintah melakukan Pembangunan dalam segala aspek yang merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Perkembangan pembangunan yang sudah terjadi di Indonesia pada dasarnya terwujud karna adanya ketenagakerjaan. dimana, dalam membangunnya pemerintah telah mengusahakan kesejahteraan bagi setiap tenaga kerja yang merupakan sebagai sumber daya manusia. Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 menyebutkan bahawasanya “tiap-tiap warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Dengan demikian atas adanya pernyataan tersebut, hak bagi warga Negara dalam pekerjaan sudah seharusnya pemerintah mewujudkannya dengan mengusahakan lapangan pekerjaan demi terciptanya masyarakat yang sejahtera.

Salah satu upaya pemerintah dalam rangka pembangunan nasional adalah pembangunan non-fisik termasuk penggunaan Sumber Daya

Manusia (SDM) dan Pembangunan fisik Infrastruktur untuk kepentingan rakyat Indonesia. Pembangunan infrastruktur meliputi Pembangunan Jalan Raya sebagai Prasarana transportasi, baik antar Provinsi, Kabupaten/Kota dan Desa ke Desa, pembangunan jalan usaha tani (JUT), pembangunan Irigasi, pembangunan pasar, dan sebagainya.

Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT), adalah salah satu upaya pemerintah dalam mendukung perekonomian masyarakat. Jalan usaha tani atau jalan pertanian merupakan prasarana transportasi pada kawasan pertanian (tanaman pangan, perkebunan rakyat, dan peternakan) untuk memperlancar mobilitas alat dan mesin pertanian, pengangkutan sarana produksi menuju lahan pertanian, dan mengangkut hasil produk pertanian dari lahan menuju tempat penyimpanan, tempat pengolahan, atau pasar. maka dari itu pemerintah melakukan pembangunan jalan usaha tani untuk menunjang percepatan perekonomian masyarakat. Agar terwujudnya pembangunan jalan usaha tani yang terlaksana dengan baik, maka perlu pengadaan lokasi atau lahan pembangunan dengan melibatkan persetujuan dari masyarakat lokal/setempat. Untuk itu pemerintah mengharapkan pembebasan lahan tanah pada jalur pembangunan melalui hibah tanah, dengan melakukan musyawarah yang mengedepankan persetujuan oleh pemilik tanah demi untuk memenuhi kepentingan, kebutuhan dan kesejahteraan bersama.

Menurut Syamzan Syukur (2013:133) dalam Ariyani, 2022, musyawarah dapat berarti nasehat, perundingan pikiran, konsiderans permufakatan atau konsultasi dengan cara meminta nasehat/pendapat kepada orang lain untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, sedangkan mufakat menurut Fuad Wasitaatmadja dalam Arum adalah suatu kesepakatan yang dihasilkan oleh para peserta musyawarah dalam rangka memecahkan masalah, berupa pendapat-pendapat yang telah disetujui dari pihak-pihak yang terdapat dalam kegiatan musyawarah. Seperti halnya yang terjadi di Desa Tetelesi Afia Kecamatan Gunungsitoli Utara, Kegiatan pembangunan jalan usaha tani yang menimbulkan masalah dimana proses pelaksanaan pembangunan terjadi

kesalahpahaman antara pihak masyarakat pemilik lahan dan pihak kontraktor pelaksana yang saling mempertahankan pendapat. Terkait masalah perubahan yang dilakukan Kontraktor secara sepihak dan tidak melaksanakan sesuai mufakat dari hasil musyawarah terdahulu. Dimana, Mufakat atau kesepakatan tersebut menekankan bahwa mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja lokal atau pemberdayaan masyarakat setempat beserta pemilik lahan tanah dalam proses pembangunan tersebut. Pemanfaatan tenaga kerja lokal atau pemberdayaan masyarakat merupakan upaya penggunaan atau mempekerjakan tenaga kerja setempat, juga sebagai peluang bagi masyarakat setempat mendapatkan lapangan kerja untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi.

Menurut Jim Ife (1997) dalam Maarif, 2021, menjelaskan bahwa definisi pemberdayaan ialah memberikan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan kepada warga untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depan mereka sendiri dan berpartisipasi pada upaya mempengaruhi kehidupan dari kelompoknya. Pada prinsipnya tenaga kerja lokal adalah tenaga kerja setempat atau tenaga kerja asli dari suatu daerah, dengan kemampuan untuk mengeluarkan usaha tiap satuan waktu untuk menghasilkan barang atau jasa, baik untuknya sendiri ataupun untuk orang lain. Namun, pada kenyataannya di hari pertama mulai proses pembangunan Jalan Usaha Tani di Desa Tetehosi Afia, menuai protes bahkan terjadi kontroversi dan resistensi dari pihak masyarakat kepada kontraktor pelaksana dan pemerintah karna tidak komitmen terhadap mufakat atau kesepakatan yang telah ditetapkan.

Herskovitch dalam Nuri, 2022 mendefinisikan resistensi terhadap perubahan sebagai perilaku karyawan yang dimaksudkan untuk menghindari perubahan dan atau mengganggu suksesnya penerapan perubahan dalam bentuk tertentu. resistensi terhadap perubahan merupakan resistensi terhadap kehilangan pada suatu yang berharga atau kehilangan yang diketahui dengan berpindah ke yang tidak diketahui. Terkadang, orang menolak pemaksaan perubahan yang diterima sebagai kebenaran universal (Burke, 2008). Resistensi terhadap perubahan juga terkait dengan perlawanan yang

dilakukan karena adanya kekhawatiran akan kehilangan sesuatu yang berharga dan sudah diketahui sebelumnya, dan akan digantikan dengan sesuatu yang baru yang belum diketahui (Yilmaz & Kilicoglu, 2013). Resistensi terhadap perubahan menurut Lines dalam (Erwin & Garman, 2010) adalah perilaku yang memperlambat atau mengakhiri usaha perubahan.

Menurut Silvio De Bono (2008) dalam Alfa, & Kinanda, 2019 mengungkapkan bahwa terdapat delapan hal yang dapat menjadi penyebab munculnya perilaku resistensi, yaitu:

1. Tidak Sepakat dengan Perubahan
2. Memiliki Keyakinan yang Salah
3. Takut Gagal
4. Adanya Ketidapahaman dan Ketiadaan Kepercayaan
5. Takut Kehilangan Benda yang Bernilai
6. Ketidakberdayaan
7. Enggan Meninggalkan Zona Nyaman
8. Takut Terhadap Perubahan

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian ini dengan judul **“Analisis Intensitas Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Jalan Usaha Tani di Desa Tetehosi Afia Kecamatan Gunungsitoli Utara”**.

1.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih data yang relevan dan yang tidak relevan (Moleong, 2010). Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan/urgensi dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Penelitian ini akan difokuskan pada Analisis Intensitas Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Jalan Usaha Tani di Desa Tetehosi Afia Kecamatan Gunungsitoli Utara.

1.3 Rumusan Masalah

Untuk mempermudah pemahaman terhadap permasalahan dalam penelitian ini, maka peneliti merumuskan permasalahan yaitu :

1. Bagaimana Intensitas Pemberdayaan Masyarakat dalam proyek pembangunan Jalan Usaha Tani di Desa Tetehosi Afia Kecamatan Gunungsitoli Utara?
2. Bagaimana mekanisme proyek pembangunan Jalan Usaha Tani yang tidak sesuai dengan kesepakatan masyarakat di Desa Tetehosi Afia Kecamatan Gunungsitoli Utara?
3. Bagaimana solusi yang dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat yang tidak terlibat dalam pembangunan Jalan Usaha Tani di Desa Tetehosi Afia Kecamatan Gunungsitoli Utara?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Intensitas Pemberdayaan Masyarakat dalam proyek pembangunan Jalan Usaha Tani di Desa Tetehosi Afia Kecamatan Gunungsitoli Utara
2. Untuk mengetahui mekanisme proyek pembangunan Jalan Usaha Tani yang tidak sesuai dengan kesepakatan masyarakat di Desa Tetehosi Afia Kecamatan Gunungsitoli Utara.
3. Untuk mengetahui solusi yang dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat yang tidak terlibat dalam pembangunan Jalan Usaha Tani di Desa Tetehosi Afia Kecamatan Gunungsitoli Utara

1.5 Kegunaan Hasil Penelitian

1. Bagi peneliti
Dapat menambah pengetahuan sebagai bekal dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh dibangku kuliah dalam dunia kerja yang sesungguhnya

2. Bagi organisasi/intansi
Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang berharga bagi organisasi/intansi dalam pengelolaan SDM beserta segala kebijakan yang berkaitan langsung dengan aspek-aspek SDM secara lebih baik
3. Bagi almamater
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan referensi bacaan dari semua pihak yang membutuhkannya
4. Bagi Peneliti lanjutan
Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi dasar dan rujukan teori penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti berikutnya dengan berpedoman pada penelitian ini.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui gambaran dari penelitian ini maka disusun sistematika penelitian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penelitian menguraikan tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan tentang kajian teori dalam penelitian serta diakhiri dengan kerangka pemikiran dan dekskripsi penelitian

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang Lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, variabel penelitian, sumber data, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan jadwal penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Intensitas

Intensitas dapat memiliki beberapa pengertian tergantung pada konteksnya. Secara umum, intensitas mengacu pada tingkat atau derajat kekuatan atau kecanggihan suatu fenomena atau proses. Berikut adalah beberapa pengertian intensitas dalam beberapa bidang:

1. Dalam fisika, intensitas mengacu pada jumlah energi yang melewati suatu area tertentu per satuan waktu. Misalnya, dalam konteks gelombang suara, intensitas suara mengukur kekuatan gelombang suara dan dinyatakan dalam desibel.
2. Dalam optik, intensitas cahaya mengacu pada jumlah energi cahaya yang melewati suatu area tertentu per satuan waktu. Intensitas cahaya sering digunakan untuk menggambarkan tingkat kecerahan atau kekuatan cahaya dalam aplikasi seperti fotografi, pencahayaan ruangan, atau penelitian ilmiah.
3. Dalam konteks olahraga, intensitas mengacu pada tingkat kegiatan fisik yang dilakukan oleh atlet selama latihan atau pertandingan. Intensitas olahraga bisa diukur berdasarkan denyut jantung, kecepatan, durasi, atau tingkat usaha fisik yang diperlukan.
4. Dalam ekonomi, intensitas mengacu pada tingkat penggunaan atau produksi suatu sumber daya dalam suatu proses produksi. Misalnya, intensitas energi mengukur jumlah energi yang diperlukan untuk menghasilkan suatu output tertentu, sementara intensitas tenaga kerja mengukur jumlah tenaga kerja yang diperlukan untuk memproduksi suatu barang atau jasa.

Intensitas dalam bidang ekonomi dapat diartikan berbeda oleh para ahli ekonomi tergantung pada konteks penelitian atau analisis yang dilakukan antara lain : Menurut ekonom Milton Friedman dalam elpisah 2022, intensitas merujuk pada ukuran kekuatan atau tingkat perubahan suatu variabel ekonomi tertentu. Misalnya, intensitas inflasi mengacu pada

tingkat perubahan harga secara umum di suatu perekonomian. Sedangkan Menurut ekonom Paul Samuelson dalam Trisnawati 2019, intensitas dapat merujuk pada tingkat penggunaan sumber daya tertentu dalam produksi. Misalnya, intensitas modal mengukur sejauh mana modal digunakan dalam produksi suatu barang atau jasa dibandingkan dengan faktor-faktor produksi lainnya seperti tenaga kerja.

Dapat disimpulkan, bahwa pengertian intensitas dalam bidang ekonomi dapat bervariasi tergantung pada kerangka teoritis dan konteks penelitian yang digunakan oleh para ahli ekonomi. Dalam semua kasus, intensitas umumnya mengacu pada tingkat kekuatan, perubahan, penggunaan sumber daya, persaingan, atau fokus dalam konteks ekonomi.

2.1.1 Intensitas Pemberdayaan Masyarakat

Intensitas pemberdayaan masyarakat dapat didefinisikan dan dijelaskan oleh berbagai ahli dengan sudut pandang yang berbeda. Berikut adalah beberapa definisi dan pendapat dari para ahli terkait intensitas pemberdayaan masyarakat:

1. Menurut Rappaport (1984) dalam Mujahiddin 2022, mendefinisikan pemberdayaan sebagai "proses melalui mana individu, kelompok, atau komunitas meningkatkan kontrol atas faktor-faktor yang mempengaruhi hidup mereka." Menurut Rappaport, intensitas pemberdayaan dapat diukur melalui perubahan yang terjadi dalam tingkat partisipasi, pengaruh, dan akses terhadap sumber daya bagi individu atau kelompok.
2. Menurut Zimmerman (1995) dalam Sulaeman 2020, mengartikan pemberdayaan sebagai "proses di mana individu atau kelompok meningkatkan kemampuan mereka untuk mengontrol atau mempengaruhi lingkungan mereka sendiri." Intensitas pemberdayaan, menurut Zimmerman, mencakup tingkat motivasi, kepercayaan diri, dan keterlibatan individu atau kelompok dalam mengambil tindakan untuk mencapai tujuan mereka.

3. Menurut Perkins dan Zimmerman (1995) dalam Sulaeman 2020, menggambarkan pemberdayaan sebagai "proses di mana individu atau kelompok-kelompok masyarakat memperoleh pemahaman dan kontrol atas faktor-faktor yang mempengaruhi hidup mereka." Mereka menyoroti bahwa intensitas pemberdayaan melibatkan pemahaman yang lebih baik tentang kekuatan, sumber daya, dan proses yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.
4. Menurut Sen (1999) dalam Mujahiddin 2022, berpendapat bahwa pemberdayaan melibatkan pemberian kesempatan, kebebasan, dan kemandirian kepada individu untuk mempengaruhi kehidupan mereka sendiri. Bagi Sen, intensitas pemberdayaan dapat diukur melalui peningkatan dalam kapasitas individu untuk mengambil keputusan, memiliki akses terhadap sumber daya, dan mengambil tindakan yang bermanfaat bagi diri mereka sendiri dan masyarakat secara keseluruhan.

Intensitas pemberdayaan masyarakat merujuk pada tingkat atau derajat di mana suatu masyarakat diberdayakan atau memberdayakan dirinya sendiri secara aktif dalam mengelola sumber daya, mengambil keputusan, dan mengambil bagian dalam proses pembangunan dan perubahan sosial. Intensitas pemberdayaan masyarakat juga mencerminkan sejauh mana masyarakat memiliki akses, partisipasi, dan kontrol atas sumber daya fisik, sosial, ekonomi, dan politik yang ada. Hal ini melibatkan penguatan individu dan kelompok dalam masyarakat untuk mengatasi hambatan dan ketidaksetaraan yang mungkin mereka hadapi.

2.1.2 Indikator Intensitas Pemberdayaan Masyarakat

Beberapa indikator intensitas pemberdayaan masyarakat meliputi:

1. Partisipasi: Tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, baik dalam skala lokal maupun nasional. Hal ini mencakup partisipasi dalam forum, pertemuan, dan mekanisme konsultasi.

2. Akses ke sumber daya: Ketersediaan dan akses masyarakat terhadap sumber daya seperti pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan, infrastruktur, dan sumber daya ekonomi lainnya. Intensitas pemberdayaan masyarakat meningkat jika akses ini merata dan adil bagi semua anggota masyarakat.
3. Kemandirian: Kemampuan masyarakat untuk mengelola dan mengembangkan potensi mereka sendiri tanpa bergantung secara berlebihan pada bantuan luar. Ini mencakup pengembangan keterampilan, pengorganisasian komunitas, dan penciptaan sumber daya lokal.
4. Kesetaraan dan inklusi: Masyarakat yang diberdayakan adalah masyarakat yang menghargai kesetaraan, menghormati hak asasi manusia, dan memastikan inklusi bagi semua anggotanya, terlepas dari jenis kelamin, usia, etnisitas, dan latar belakang sosial.
5. Kesadaran dan pengetahuan: Tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka, peluang yang tersedia, dan tantangan yang dihadapi. Dengan peningkatan kesadaran dan pengetahuan, masyarakat dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan berpartisipasi secara efektif dalam proses pemberdayaan.

Intensitas pemberdayaan masyarakat merupakan konsep dinamis yang dapat berubah seiring waktu. Masyarakat yang lebih diberdayakan cenderung memiliki kualitas hidup yang lebih baik, memiliki kekuatan untuk mengatasi masalah, dan berperan aktif dalam proses pembangunan yang berkelanjutan.

2.2 ⁵ Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

⁵ Teori Pemberdayaan Masyarakat menurut Jim Ife dalam Maarif, 2021 menjelaskan bahwa definisi pemberdayaan ialah memberikan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan kepada warga untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depan mereka sendiri dan berpartisipasi pada upaya mempengaruhi kehidupan dari kelompoknya. Menurut Jim Ife, konsep pemberdayaan memiliki hubungan

erat dengan dua konsep pokok yakni: konsep power (daya) dan konsep disadvantaged (ketimpangan). Maka, pengertian pemberdayaan dapat dijelaskan menggunakan 4 perspektif: pluralis, elitis, strukturalis, dan post-strukturalis. Dalam buku Pengembangan Masyarakat karya Zubaedi (2013: 21-22), penjelasan dari 4 perspektif itu masing-masing adalah sebagai berikut.

- a) Pertama, perspektif pluralis melihat pemberdayaan sebagai proses buat menolong individu maupun kelompok masyarakat yang kurang beruntung, supaya mereka dapat bersaing secara lebih efektif. Dalam perspektif pluralis, pemberdayaan yang dilakukan adalah menolong masyarakat dengan memberikan pembelajaran tentang cara menggunakan keahlian dalam melobi, menggunakan media yang berhubungan dengan tindakan politik dan memahami bagaimana bekerjanya sistem (aturan main). Jadi, pemberdayaan dilakukan dengan meningkatkan kapasitas masyarakat agar dapat bersaing secara wajar sehingga tidak ada yang menang atau kalah.
- b) Kedua, perspektif elitis memandang pemberdayaan sebagai upaya untuk mempengaruhi kalangan elite, seperti para pemuka atau tokoh masyarakat, pejabat, orang kaya, dengan cara membentuk aliansi dengan mereka, atau melakukan konfrontasi dan mengupayakan perubahan pada kalangan elite. Upaya ini dilakukan mengingat masyarakat menjadi tak berdaya karena adanya power dan kontrol yang kuat dari para elite.
- c) Ketiga, perspektif strukturalis memandang pemberdayaan sebagai agenda perjuangan yang lebih menantang karena tujuannya adalah menghapus bentuk-bentuk ketimpangan struktural. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pembebasan yang harus dibarengi oleh perubahan struktural secara fundamental serta hilangnya penindasan struktural.
- d) Keempat, perspektif Post-strukturalis menilai pemberdayaan sebagai upaya mengubah diskursus yang menekankan pada aspek intelektualitas ketimbang aksi atau praksis. Jadi, pemberdayaan

masyarakat dipahami sebagai langkah mengembangkan pemahaman terhadap perkembangan pemikiran baru dan analitis. Titik tekan pemberdayaan pada aspek pendidikan kepada masyarakat.

Menurut widjaja (2002:77) dalam Ramadani 2020, pemberdayaan masyarakat adalah pemberian wewenang pendelegasian wewenang atau pemberian otonomi kejawatan bawah yang intinya pemberdayaan upaya membangkitkan segala kemampuan yang ada untuk mencapai tujuan dan pemberdayaan diadakan agar daerah semakin mampu serta mandiri, maksudnya mampu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menunjukkan ciri sebagai masyarakat serta membangun kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Menurut soeharto (2006:76) dalam Oktoliya 2021, pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat serta potensi kemampuan yang mereka memiliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang sering terkait yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati dirinya, serta mengangkat harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi, sosial, agama dan budaya.

Menurut Eko (2004:11) dalam Oktoliya 2021, Pemberdayaan merupakan sebuah gerakan dan proses berkelanjutan untuk membangkitkan potensi, memperkuat partisipasi, membangun peradaban dan kemandirian masyarakat. Menurut Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang desa pemberdayaan masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan dan kesadaran masyarakat. Peraturan pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang desa yang menyebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan didesa

ditunjukkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan dan program serta kegiatan yang sesuai dengan esensi dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Dari beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki oleh masyarakat sehingga masyarakat berkemampuan dan berkekuatan. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya memandirikan masyarakat melalui perwujudan potensi kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan demikian pada setiap upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah harus dipandang sebagai sebuah pemacu untuk menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam semua aspek sehingga mampu menciptakan masyarakat yang mandiri terbebas dari kemiskinan dan keterbelakangan sehingga yang demikian dapat mengembangkan kehidupan masyarakat.

2.2.1 Konsep Pemberdayaan

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mendapat awalan ber- yang menjadi kata “berdaya” artinya memiliki atau mempunyai daya. Daya artinya kekuatan, berdaya artinya memiliki kekuatan. Pemberdayaan artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya atau mempunyai kekuatan. Pemberdayaan dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari *empowerment* dalam bahasa Inggris. Pemberdayaan sebagai terjemahan dari *empowerment* menurut Merriam Webster dalam *Oxford English Dictionary* mengandung dua pengertian yakni, “*To give ability or enable to*”, artinya “memberi kecakapan/kemampuan atau memungkinkan”. Dan “*To give power of authority to*”, artinya “memberi kekuasaan”. Hakikat dari konseptualisasi *empowerment* berpusat pada manusia dan kemanusiaan, dengan kata lain manusia dan kemanusiaan sebagai tolok ukur normatif, struktural, dan substansial. Pemberdayaan ini memiliki tujuan dua arah, yaitu “melepaskan belenggu kemiskinan dan

keterbelakangan” dan “memperkuat posisi lapisan masyarakat dalam struktur kekuasaan”. Keduanya harus ditempuh dan menjadi sasaran dari upaya pemberdayaan. Pemberdayaan menurut Friedman (1992) dalam hal ini pembangunan alternatif menekankan keutamaan politik melalui otonomi pengambilan keputusan untuk melindungi kepentingan rakyat yang berlandaskan pada sumberdaya pribadi, langsung melalui partisipasi, demokrasi dan pembelajaran sosial melalui pengamatan langsung. Priyono dan Pranarka (1996), berpendapat bahwa pemberdayaan mendorong terjadinya proses perubahan sosial yang memungkinkan orang-orang pinggiran yang tidak berdaya untuk memberikan pengaruh yang lebih besar di arena politik secara lokal maupun nasional. Pada sisi lain, pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah, untuk memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan dengan berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

2.2.2 Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

a. Adanya kebutuhan

Kebutuhan mencakup kebutuhan bersama dipenuhi secara bersama pula, rasa ikut tanggung jawab atau memiliki dan rasa saling memiliki.

b. Keikutsertaan

Meliputi kesadaran berkembang untuk berperan serta, meningkatkan keinginan untuk memakai sumber-sumber daya yang ada untuk kepentingan bersama, makin mendorong untuk ikut serta dalam pembangunan yang lebih luas, masyarakat dapat segera memperoleh informasi dan berkembangnya keterampilan.

c. Kesesuaian tujuan

Kesesuaian tujuan mencakup menumbuhkan semangat dan jiwa kebersamaan yang konstruktif.

d. Koperatif

Koperatif artinya memupuk kesadaran untuk saling bekerjasama, mengembangkan rasa kekeluargaan dan memperkokoh kelompok dalam mencegah perpecahan.

Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memampukan dan memandirikan masyarakat. Atau dengan kata lain adalah bagaimana menolong masyarakat untuk mampu menolong dirinya sendiri.

2.2.3 Unsur-Unsur Pemberdayaan Masyarakat

1. Ekonomi Kerakyatan

Negara Republik Indonesia, yang baru dilahirkan itu terombang – ambing dalam dilemma perjuangan fisik dan batin. Kesulitan ekonomi dihadapkan pada persoalan global suasana perubahan yang cepat dan keras melanda hampir diseluruh wilayah bekas Hindia Belanda ini. Para petani pada saat itu tidak lebih daripada budak-budak belian. Negara-negara demokrasi mempunyai tatanan ekonomi yang kapitalis, dan sebagai akibatnya tidak adil dalam distribusi kekayaan. Tidak mampu menanggulangi krisis ekonomi dan penuh kontradiksi khususnya antara persamaan formal dan ketimpangan dalam bidang materi (Legge, 2003:167) dalam Rasonna 2015.

2. Teknologi Berbasis Kerakyatan

Kemajuan ekonomi biasanya berlaku sejalan dengan spesialisasi keahlian dan perkembangan manusia. Karena itu globalisasi ekonomi adalah nyata dan tidak hanya merupakan kelanjutan, atau kebalikan dan kecenderungan-kecenderungan tahun-tahun sebelumnya. Sementara masih banyak perdagangan yang masih bersifat regional ada pula yang perekonomian yang bersifat global, di tingkat pasar keuangan. Pada dasarnya pembangunan adalah suatu perubahan, dalam hal ini perubahan tidak hanya diharapkan akan terjadi dalam taraf kehidupan masyarakat. Akan tetapi juga diharapkan terjadi pula kemajuan pada peranan dan unsur-unsur yang terlibat di dalamnya, dalam hal ini, peran negara, negara berkembang termasuk Indonesia, Negara masih

mempunyai peranan penting atau tanggungjawab terhadap ekonomi rakyatnya.

3. Pendidikan

Warisan kolonial di bidang pendidikan perlu di lihat dari dua tingkat pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Pendidikan dasar merupakan langkah minimal yang diperlukan untuk bertindak secara efektif dalam suasana berat. Sedangkan pendidikan menengah dianggap penting bagi pembangunan politik ekonomi.

2.2.4 Konsep Kebijakan

Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk menguraikan pengambilan keputusan. Menurut Thomas R. Dye Edi, (2008:4) dalam Erlisa 2018 kebijakan adalah sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial. Namun, kebijakan bisa juga dirumuskan berdasarkan keyakinan bahwa masalah sosial akan dapat dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada dan tidak memerlukan tindakan tertentu.

Titmus dalam (Erlisa, 2018) mendefenisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu yang menurutnya kebijakan itu senantiasa berorientasi pada masalah-masalah (*problem-oriented*) dan berorientasi kepada tindakan (*action-oriented*). Proses kebijakan dapat dipandang sebagai rangkaian kegiatan yang meliputi tiga kelompok tahapan kegiatan utama yaitu:

1. Pembuatan atau perumusan kebijakan (mempersentasikan fungsi manajemen perencanaan), yang meliputi:
 - a. Penyusunan agenda kegiatan
 - b. Perumusan kebijakan
2. Pelaksanaan atau implementasi kebijakan (mempersentasikan fungsi manajemen pelaksanaan atau *actuating*).

3. Evaluasi kinerja kebijakan (mempersentasikan fungsi manajemen pengawasan atau (*controlling*), yang dilakukan melalui kegiatan-kegiatan pemantauan, pengawasan (internal dan eksternal) dan pertanggung jawaban atau akuntabilitas (Nugroho,2004:23) bahwa kebijakan public adalah keputusan yang dibuat oleh negara nya, khususnya pemerintah sebagai strategi untuk mengantarkan masyarakat ada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi untuk menuju pada masyarakat yang dicita-citakan.

Maka kesimpulannya Untuk memecahkan, mengurangi dan mencegah terjadinya suatu masalah diperlukan suatu kebijakan yang diformulasikan dengan tujuan, sasaran dan suatu implementasi dari kebijakan itu sendiri yang merupakan proses lebih lanjut dari tahap formulasi kebijakan.

2.3 Pengertian Pembangunan

Menurut Ndraha (2007:35) dalam Rasonna 2015, pembangunan dapat diartikan sebagai usaha yang di selenggarakan secara sadar guna menciptakan perubahan-perubahan dan pertumbuhan di segala bidang dalam rangka mencapai tujuan negara dan bangsa. Sedangkan Siagian (2007:2) dalam Rasonna 2015, mendefenisikan pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana untuk dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa.

Seperti tercantum dalam Tap/MPR/No.II/1989 bahwa hakekat daripada pembangunan itu sendiri adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Disini terlihat jelas bahwa pembangunan seluruh masyarakat Indonesia dalam ikatan bangsa Indonesia yang mencerminkan situasi tersebut. Oleh sebab itu berhasilnya Pembangunan Nasional sebagai Pengamalan Pancasila tergantung pada partisipasi seluruh rakyat serta sikap mental, tekad dan semangat, ketaatan dan disiplin seluruh rakyat Indonesia serta para penyelenggara negara.

Adapun pelaksanaan pembangunan yang di laksanakan di Indonesia bukanlah suatu kegiatan yang asal jadi ataupun meniru dan mengikuti mode pembangunan yang dilaksanakan di negara lain melainkan sungguh-sungguh didorong oleh keinginan untuk memperbaiki taraf hidup dan martabat masyarakat Indonesia. Kita juga mengetahui bahwa pembangunan mempunyai tujuan yaitu terdiri dari jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek. Dan untuk melaksanakan pembangunan itu diperlukan adanya kemampuan untuk melaksanakannya.

Adapun kemampuan yang dimaksud ialah kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas, yang terdiri dari beberapa variabel yaitu :

1. Kepemimpinan
2. Struktur organisasi
3. Sarana dan fasilitas yang terbagai atas :
 - a. Sarana fisik
 - b. Biaya

2.3.1 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Jalan Usaha Tani

Pada prinsipnya pemberdayaan masyarakat atau tenaga kerja lokal adalah tenaga kerja setempat atau tenaga kerja asli dari suatu daerah, dengan kemampuan untuk mengeluarkan usaha tiap satuan waktu untuk menghasilkan barang atau jasa, baik untuknya sendiri ataupun untuk orang lain. Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT), adalah salah satu upaya pemerintah dalam mendukung perekonomian masyarakat. Jalan usaha tani atau jalan pertanian merupakan prasarana transportasi pada kawasan pertanian (tanaman pangan, perkebunan rakyat, dan peternakan) untuk memperlancar mobilitas alat dan mesin pertanian, pengangkutan sarana produksi menuju lahan pertanian, dan mengangkut hasil produk pertanian dari lahan menuju tempat penyimpanan, tempat pengolahan, atau pasar. maka dari itu pemerintah melakukan pembangunan jalan usaha tani untuk menunjang percepatan perekonomian masyarakat. Agar terwujudnya pembangunan jalan usaha tani yang terlaksana dengan baik

maka, perlu melibatkan persetujuan dari masyarakat lokal/setempat. Untuk itu pemerintah mengharapkan pembebasan lahan tanah pada jalur pembangunan melalui hibah tanah, dengan melakukan musyawarah yang mengedepankan persetujuan oleh pemilik tanah demi untuk memenuhi kepentingan, kebutuhan dan kesejahteraan bersama. Mufakat yang telah disepakati tersebut, mengutamakan pemberdayaan masyarakat setempat dalam memberikan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan kepada warga untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depan mereka sendiri dan berpartisipasi pada upaya mempengaruhi kehidupan dari kelompoknya (Jim Ife,1997) dalam Maarif, 2021.

2.3.2 Jenis-Jenis Pembangunan

Ada dua jenis pembangunan antara lain, pembangunan fisik dan pembangunan non-fisik dalam kehidupan masyarakat (bappeda, 2017), berikut adalah penjelasannya :

a) Pembangunan Fisik

Fisik dalam istilah pembangunan meliputi sarana dan juga prasarana pemerintahan seperti: Jalan, Jembatan, Pasar, Pertanian dan Irigrasi. Kondisi fisik ini dapat berupa letak geografis, dan sumber-sumber daya alam. Letak geografis sebuah desa sangat menentukan sekali percepatan didalam sebuah pembangunan. Letaknya strategis, dalam arti tidak sulit untuk dijangkau akibat relief geografisnya. Kecepatan proses pembangunan dan perkembangan suatu kelurahan juga sangat ditentukan oleh intensitas hubungannya dengan dunia luar, mobilitas manusia dan budaya akan mempercepat perkembangan desa itu sendiri. Menurut B.S Muljana (2001:3) pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah umumnya yang bersifat infrastruktur atau prasarana, yaitu bangunan fisik ataupun lembaga yang mempunyai kegiatan lain dibidang ekonomi, sosial budaya, politik dan pertahanan keamanan. Sumber daya alam yang terdapat dimasing-masing desa. Dimana sebuah desa yang mempunyai

kekayaan sumber daya alam yang banyak dari pada desa-desa lainnya, sehingga untuk mengembangkan atau dalam proses pembangunan desa akan jauh lebih baik dari pada desa yang sedikit mempunyai sumber daya alam, atau tidak ada sama sekali.

b) Pembangunan non fisik

Didalam pembangunan suatu wilayah bukan hanya melakukan program pembangunan yang bergerak dibidang pembanguan fisik saja tetapi juga harus bergerak dibidang pembangunan non fisik atau sosial. Bachtiar Effendi (2002:114) oleh karena itu, pembangunan hendaknya harus adanya keseimbangan antara pembangunan fisik ataupun pembangunan non fisiknya. Yang menjadi bagian dari pembangunan non fisik atau sosial yaitu : Pembangunan manusia, Ekonomi, Kesehatan, dan Pendidikan. Pembangunan non fisik berkaitan dengan penggunaan sumber daya manusia itu sendiri. Adapun pembangunan antara lain pembangunan di bidang kesehatan, pembangunan di bidang pendidikan, pembangunan di bidang ekonomi dan lain sebagainya. Pembangunan non fisik mengedepankan sumberdaya manusia, dikarenakan dengan adanya pembangunan non fisik menjadi dasar untuk melakukan pembangunan fisik. Jangan sampai pembangunan bertumpu pada salah satu aspek saja, tetapi pembangunan tersebut haruslah bersinergi satu sama lain. Pembangunan non fisik dilakukan guna meningkatkan taraf dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya, baik peningkatan dan kesejahteraan masyarakatnya dalam bidang pendidikan, kesejahteraan masyarakat bidang kesehatan maupun kesejahteraan dalam bidang lainnya. Oleh karena itu peran manusia dalam pembangunan nonfisik perlu diperhatikan.

2.3.3 Manfaat Pembangunan

Menurut Bryant dan White dalam Hajar (2018:8) ⁹ manfaat pembangunan, yaitu:

1. *Capicity* (kapasitas). Pembangunan seharusnya dapat menumbuhkan kapasitas manusia baik secara individual maupun secara organisatoris, sehingga dengan kemampuan tersebut manusia dapat mencapai kualitas hidup secara efektif dan efisien.
2. *Equity* (Ekuitas). Tujuan pembangunan adalah untuk mencapai pemerataan distribusi sumberdaya yang dibutuhkan oleh masyarakat secara adil. Dengan pemerataan dan keadilan distribusi sumberdaya inilah kesejahteraan yang dapat tercapai oleh masyarakat.
3. *Empowerment* (Pemberdayaan). Pembangunan adalah memberdayakan masyarakat secara individual dan secara kelompok untuk dapat mengembangkan potensi dirinya sehingga dapat memanfaatkan sumberdaya yang dimilikinya untuk perubahan hidup yang lebih baik,
4. *Sustainability* (Keberlanjutan). Pembangunan merupakan proses untuk mengembangkan kemampuan dan potensi diri untuk mencapai kehidupan yang lebih layak, dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki secara berkelanjutan.
5. *Symbiosis mutualis and interdependensi*. Pembangunan adalah suatu proses kerjasama yang saling menguntungkan, dan semaksimal mungkin tidak menciptakan saling ketergantungan antara sesama.

2.4 Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebelumnya, telah ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, penelitian yang pertama dibahas ini adalah penelitian tentang Pemberdayaan masyarakat dalam Pembangunan infrastruktur jalan Di lingkungan kalatin kelurahan lowu utara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pemberdayaan dan tingkat pendapatan masyarakat akibat pembangunan infrastruktur jalan di Lingkungan Kalatin, Kelurahan Lowu Utara, Kecamatan Ratahan. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer yang diperoleh dari wawancara dan pengisian kuesioner terhadap masyarakat yang tinggal di Lingkungan Kalatin dan data sekunder yang

diperoleh dari instansi terkait. Pengumpulan data dilakukan selama 3 bulan, dimulai dari bulan Juni 2018 sampai dengan Agustus 2018. Data yang terkumpul disusun secara kuantitatif dan ditampilkan dalam bentuk tabel dengan jumlah sampel 30 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi masyarakat dalam bekerja sama untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur jalan di Lingkungan Kalatin dinyatakan berjalan dengan baik karena masyarakat Lingkungan Kalatin melakukan bentuk partisipasi berupa pelaksanaan dalam bentuk tenaga, makanan dan minuman. Pembangunan infrastruktur jalan di Lingkungan Kalatin memberikan dampak peningkatan pendapatan sebesar 14,29% - 650% atau 6 kali lipat dari pendapatan pada saat jalan belum diperbaiki. Hal ini karena infrastruktur jalan mempermudah akses pemasaran hasil komoditi baik didalam maupun diluar daerah Lingkungan Kalatin (Ponowu Dkk, 2019).

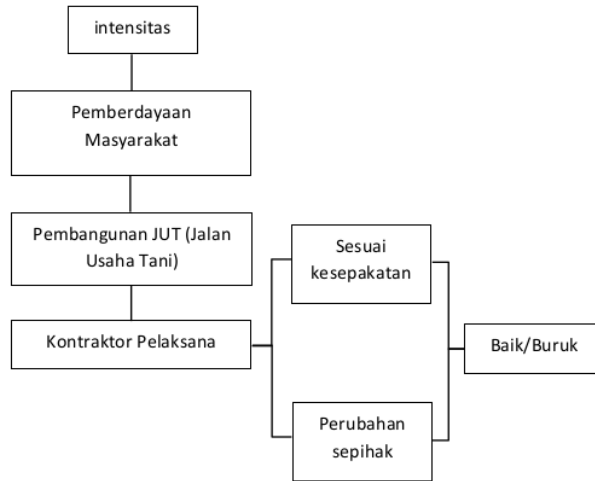
Penelitian pemberdayaan masyarakat selanjutnya dapat di lihat dalam studi tentang pemanfaatan tenaga kerja lokal pada perusahaan nasional di bidang batu bara (studi kasus pt. kideco jaya agung di desa batu kajang kecamatan batu sopang kabupaten paser). Jenis penelitian ini adalah menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan proses rekrutmen, pelatihan dan penempatan, penghargaan yang diberikan perusahaan kepada tenaga kerja lokal dan respon tenaga kerja lokal terhadap system ketenagakerjaan pada perusahaan nasional batu bara PT Kideco Jaya Agung. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis data model interaktif. Hasil menunjukkan bahwa dalam proses rekrutmen tenaga kerja PT. Kideco Jaya Agung melalui tahap demi tahap rekrutmen, yakni : analisis kebutuhan tenaga kerja, proses seleksi, tes kandidat, offering, sign kontrak, dan penempatan karyawan. dalam proses rekrutmennya perusahaan PT. Kideco Jaya Agung memprioritaskan masyarakat lokal atau tenaga kerja lokal dengan alokasi 75,2% karyawan

masyarakat lokal dan 24,8% karyawan non lokal. Dalam meningkatkan kemampuan dan keahlian tenaga kerja lokal, PT. Kideco Jaya Agung secara rutin memberikan pelatihan dalam bentuk teknik, manajemen, motivasi dan presentasi. Secara umum respon tenaga kerja lokal terhadap sistem ketenagakerjaan di perusahaan PT. Kideco Jaya Agung, positif (permadi Dkk, 2019).

2.5 Kerangka Pemikiran

Analisis intensitas pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan jalan usaha tani dapat dilakukan melalui kerangka pemikiran dengan mengidentifikasi tujuan pembangunan jalan usaha tani yaitu untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat di daerah pertanian. Jalan ini diharapkan dapat memudahkan petani dalam mengangkut hasil panen, memperluas pasar, dan mengurangi biaya logistik. Dalam kerangka ini, pemberdayaan masyarakat merupakan aspek kunci yang perlu diperhatikan. Berawal dari intensitas pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan jalan usaha tani oleh kontraktor pelaksana yang sebelumnya telah membuat kesepakatan dalam proses pembangunan terkait. Kontraktor pelaksana atau biasa disebut pemborong adalah badan hukum atau perorangan yang dipilih sebagai pelaksana untuk pekerjaan proyek yang berdasarkan keahlian. Untuk itu dalam proses pelaksanaannya, peneliti menganalisis intensitas pemberdayaan masyarakat dengan melihat, apakah proses pelaksanaan pembangunan sesuai dengan yang telah di sepakati bersama dalam pemberdayaan masyarakat atau terjadi perubahan sepihak oleh kontraktor pelaksana. jika proses pelaksanaan sesuai dengan yang telah disepakati maka hasilnya berjalan dengan baik, akan tetapi Jika terjadi perubahan secara sepihak oleh kontraktor maka tentunya menimbulkan resistensi dari masyarakat sehingga mendapatkan hasil yang buruk. Dengan menggunakan kerangka pemikiran ini, analisis intensitas pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan jalan usaha tani dapat dilakukan secara sistematis dan komprehensif.

Berdasarkan penjelasan diatas maka, bentuk kerangka pemikiran penelitian ini adalah:



Gambar 2.1 kerangka pemikiran

Sumber penulis : peneliti, 2023

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat di mana peneliti mendapatkan data dan informasi yang diperlukan untuk melakukan penelitian. Tempat dimana, penelitian yang dipilih oleh peneliti yang sebelumnya telah diobservasi terlebih dahulu. Maka yang menjadi lokasi penelitian adalah Dusun IV Desa Tetehosi Afia Kecamatan Gunungsitoli Utara

3.2 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata gambar, bukan angka-angka. Menurut Bogdan dalam Moleong (2018:4) metodologi kualitatif menyatakan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati. Penelitian kualitatif ini menggunakan pengamatan, wawancara dan penelaah dokumen.

menurut Moleong (2016:6), Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami dalam penelitian, seperti: perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Artinya penelitian ini tidak berbentuk angka dan bilangan tetapi berbentuk pertanyaan-pertanyaan atau kalimat.

3.3 Variabel Penelitian

Variabel penelitian pada dasarnya adalah sesuatu yang akan menjadi fokus perhatian yang memberikan pengaruh dan mempunyai nilai (value). Variabel merupakan suatu besaran yang dapat diubah atau berubah sehingga dapat mempengaruhi peristiwa atau hasil penelitian. Menurut Suryabrata (2015:25) bahwa istilah variabel dapat diartikan bermacam-macam. Dalam

penelitian ini variabel diartikan sebagai segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan penelitian, sering juga dinyatakan variabel penelitian sebagai faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa atau gejala yang akan diteliti. Maka penelitian ini terdiri dari variabel tunggal (1) yaitu tertuju pada analisis intensitas pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan jalan usaha tani di Desa Tetehosi Afia Kecamatan Gunungsitoli Utara.

3.4 Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu data primer. Data primer adalah sebuah data yang langsung didapatkan dari sumber dan diberi kepada pengumpul data atau peneliti. Dalam penelitian ini, data primer yang dimaksud merupakan hasil diskusi, dialog atau wawancara secara langsung dengan informan, antara lain: kepala desa Tetehosi afia, Kepala Dusun, Ketua kelompok Tani selaku pemberi usulan pembangunan, masyarakat pemilik lahan dan masyarakat setempat.

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini yaitu:

Sumber Data

Tabel 3.1

No	Nama	Informan	Keterangan
1		a) Masyarakat pemilik Lahan b) Masyarakat pemilik lahan c) Masyarakat pemilik lahan d) Masyarakat pemilik lahan e) Masyarakat pemilik lahan f) Masyarakat	7

		setempat g) Masyarakat setempat (Informan Utama)	
2		Ketua kelompok Tani Fariawo (Informan Kunci)	1
3		a) Kepala Desa Tetehosi Afia b) Kepala dusun IV desa Tetehosi Afia (Informan Pendukung)	2

Sumber Penulis : Diolah oleh peneliti (2023) :

3.5 Instrumen Penelitian

instrumen adalah alat atau fasilitas, yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah (Arikunto, 2019:203). Instrumen penelitian yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah kamera, telpon genggam untuk recorder, pensil ballpoint, dan buku tulis.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang akan diteliti. Dalam hal pengumpulan data ini, peneliti terjun langsung pada objek penelitian untuk mendapatkan data yang valid, dengan melakukan metode:

a. Observasi

Secara umum, definisi observasi adalah suatu aktivitas pengamatan mengenai suatu objek untuk mendapatkan suatu informasi atau sekadar membuktikan kebenaran dari suatu penelitian tertentu secara cermat langsung di lokasi penelitian tersebut berada. Selain itu, observasi ini juga termasuk kegiatan pencatatan yang dilakukan secara sistematis tentang semua gejala objek yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya-jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka, dan dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan. Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, tulisan, angka, dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Teknik dokumentasi dipergunakan untuk melengkapi sekaligus menambah keakuratan, kebenaran data atau informasi yang dikumpulkan dari bahan-bahan dokumentasi yang ada di lapangan serta dapat dijadikan bahan dalam pengecekan keabsahan data.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah cara atau metode untuk mengolah dan memperoleh data menjadi sebuah hasil atau informasi yang valid dan juga mudah dipahami oleh orang umum.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pengumpulan data

Langkah pertama dalam proses analisis data adalah pengumpulan data. pengumpulan data adalah langkah yang strategis dalam penelitian yang disebabkan karena tujuan utama dari penelitian untuk memenuhi standar

yang sudah ditetapkan dalam menjawab rumusan permasalahan yang diungkapkan di dalam penelitian.

b. Reduksi data

Setelah pengumpulan data langkah kedua reduksi data. Menurut Sugiyono (2018:247-249) Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting sesuai dengan topik penelitian, mencari tema dan polanya, pada akhirnya memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

c. Penyajian data

Setelah proses reduksi, langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Data yang disajikan harus sederhana, jelas agar mudah dibaca.

d. Penarikan kesimpulan

Setelah proses penyajian data langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan adalah usaha untuk mencari atau memahami makna, keteraturan, pola-pola penjelasan, alur sebab akibat dan ditulis dalam bahasa yang mudah dimengerti.

3.8 Jadwal Penelitian

Untuk dapat melaksanakan penelitian ini, dan agar lebih mudah, maka peneliti telah membuat/merancang jadwal panduan, sebagai berikut:

Jadwal Penelitian

Tabel 3.1

Kegiatan	Jadwal																								
	Maret 2023				April 2023				Mei 2023				Juni 2023				Juli 2023				Agustus 2023				
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
Kegiatan Proposal Skripsi	■	■	■																						
Konsultasi kepada Dosen Pembimbing				■	■	■	■	■	■	■															
Pendaftaran Seminar Proposal Skripsi										■															
Persiapan Seminar											■														
Seminar Proposal Skripsi												■	■	■											
Persiapan Penelitian															■										
Pengumpulan Data																■	■								
Penulisan Naskah Skripsi																	■	■							
Konsultasi Kepada Dosen Pembimbing																		■	■	■					

Sumber penulis : peneliti, 2023

BAB IV

ANALISA DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Desa Tetehosi Afia terletak di dalam Wilayah Kecamatan Gunungsitoli Utara Kota Gunungsitoli Provinsi Sumatera Utara yang berbatasan dengan :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Teluk Belukar Kecamatan Gunungsitoli Utara Kota Gunungsitoli dan Desa Umbubalodano Kecamatan Sitolu Ori Kabupaten Nias Utara
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Afia dan Desa Gawu-gawu Bouso Kecamatan Gunungsitoli Utara Kota Gunungsitoli
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lasara Sowa dan Desa Gawu-gawu Bouso Kecamatan Gunungsitoli Utara Kota Gunungsitoli
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lasara Sowa dan Desa Hambawa Kecamatan Gunungsitoli Utara Kota Gunungsitoli.

Luas wilayah Desa Tetehosi Afia adalah 900 Ha , 40% berupa daratan yang bertopografi berbukit-bukit, dan 60% daratan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Iklim Desa Tetehosi Afia sebagaimana desa-desa yang lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan hujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola pertanian dan perkebunan yang ada di Desa Tetehosi Afia Kecamatan Gunungsitoli Utara. Masyarakat Desa Tetehosi Afia sehari-harinya mayoritas bekerja sebagai Petani, Peternak, Pekebun/Penyadap karet dan yang lainnya bekerja sebagai tukang, Kuli bangunan, Nelayan, Pedagang, Pengusaha kecil-kecilan, Karyawan Swasta dan sebagian kecil sebagai Pegawai Negeri.

Desa Tetehosi Afia memiliki hamparan sawah yang luas dan lahan kosong beserta tanaman karet yang masih tanaman warisan turun-temurun dimana pohonnya sudah tua dan hasil getah karet sudah mulai menurun. Dalam sektor pertanian walaupun sudah menunjukkan kemajuan seiring berjalannya waktu yang dimana, dulunya masih dikerjakan secara manual

menggunakan tenaga hewan dan manusia, hingga kini menggunakan alat-alat canggih. Namun kendala untuk prasarana transportasi seperti Jalan Usaha Tani pada kawasan pertanian masih kurang dalam memperlancar mobilitas alat dan mesin pertanian, pengangkutan sarana produksi menuju lahan pertanian, dan mengangkut hasil produk pertanian dari lahan menuju tempat penyimpanan, tempat pengolahan, atau pasar. Untuk itu pembangunan jalan usaha tani sangat di harapkan masyarakat.

Ibu rumah tangga kebanyakan bekerja mengurus rumah tangga, Petani, Penyadap Karet, kuli Perempuan dan tidak mendapat penghasilan serta kebanyakan yang menjadi tulang punggung keluarga adalah Kepala Keluarga. Banyak anak-anak yang putus sekolah dan banyak yang masih pengangguran atau belum mendapat pekerjaan.

Banyak juga warga Desa Tetehosi Afia yang beternak Babi dan Ayam yang dibuat sebagai sampingan. dikarenakan pengetahuan SDM untuk mengelola Peternakan masih Kurang, sehingga terkadang hasil kurang memuaskan.

4.1.1 Sejarah Objek Penelitian

Desa Tetehosi Afia adalah nama salah satu Wilayah Desa yang berada di Kecamatan Gunungsitoli Utara Kota Gunungsitoli. Masyarakat Desa Tetehosi Afia termasuk dalam Masyarakat Adat Laraga dan sudah terbentuk sejak Dahulu Kala (Pemerintahan Hindia Belanda).

Nama Sebutan Desa Tetehosi Afia sebelumnya adalah Banua, Tuhezoi, Kepala Kampung dan pada tahun 1972 status kepala Desa adalah Desa Tetehosi Sowu dan dengan kesepakatan tahun 1992 Desa Tetehosi Sowu diganti dengan Desa Tetehosi Afia sampai sekarang, yang perlu diingat dari sejak terbentuknya Banua sampai sekarang istilah Desa Tetehosi Afia adalah dibawah naungan Kecamatan Tuhemberua Kabupaten Nias maka baru tahun 2006 karna pemekaran maka Desa Tetehosi Afia bergabung di Kecamatan Gunungsitoli Utara Kota Gunungsitoli dengan Pimpinan Desa atas nama Talifao Zega alm.

Pemerintah Desa yang pernah memimpin Desa Tetehosi Afia (baik yang disebut sebagai Kepala Kampung maupun yang disebut sebagai Kepala Desa antara lain :

1. Amazihono (Periode 1889-1907)
2. Buaölö Zega alias A. Zofu Zega (Periode 1908-1914)
3. A. Mbulono Zega (Periode 1915-1918)
4. Kadöfö Zega alias A. Zalösö (Periode 1915-1936)
5. Noakhi Zega alias A. Zaba (Periode 1937-1940) sebagai Pj
6. Beniami Zega alias A. Dolo (Periode 1941-1944) sebagai Pj
7. A. Zisokhi Zega (Periode 1945-1964)
8. Dalihuku Zega alias A. Dalifati (Periode 1968-1971)
9. Talimano Zega alias A. Edi (Periode 1972-1984)
10. Talifao Zega alias A. Gamara (Periode 1984-2011)
11. Aroziduhu Zega alias A. Jaya (4 bulan)
12. Folala Zega alias A. Ziagus (Periode Juni 2012- Agustus 2018)
13. Sidiaro Ziliwu alias A. Jernih (September 2018 s.d Januari 2019)
14. Sonitehe Zega (21 Januari 2019 s.d 10 Juli 2023)
15. Fotodo Zega, S.Pd.SD (10 Juli 2023 s.d sekarang) sebagai Pj

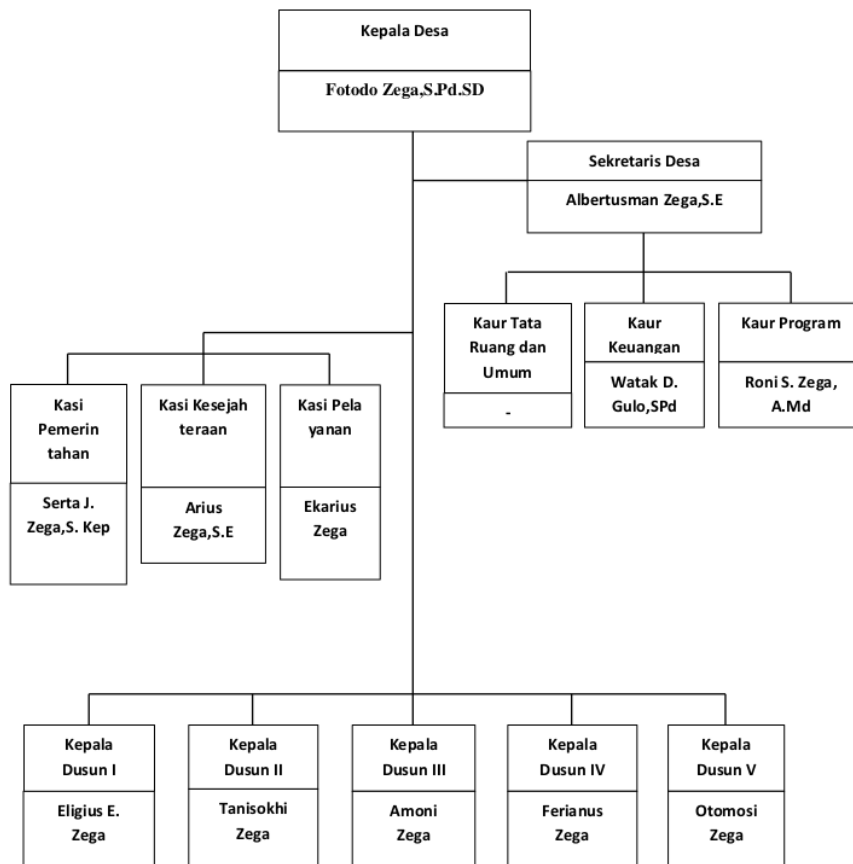
Pemerintah Desa Telah Melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Defenitif yaitu Sonitehe Zega pada tanggal 10 Desember 2018, dilantik pada tanggal 31 Desember 2018 dan serah terima pada tanggal 21 Januari 2019 yang merupakan Kepala Desa ke 14 di Desa Tetehosi Afia Kecamatan Gunungsitoli Utara. Pada tanggal 10 Juli 2023, Beliau mengundurkan diri dengan alasan mencalonkan diri sebagai Anggota DPRD Kota Gunungsitoli kemudian dilanjutkan oleh Pj. Fotodo Zega, S.Pd.SD dan serah terima pada tanggal 14 Juli 2023

4.1.2 Struktur Oganisasi

Struktur organisasi merupakan sekelompok aturan, peran, hubungan, dan tanggungjawab yang menguraikan bagaimana aktivitas organisasi diarahkan untuk mencapai tujuannya. Oleh karena itu, sangat penting setiap

organisasi memiliki struktur organisasi, sehingga setiap orang dapat menjalankan fungsinya masing-masing demi mencapai tujuan organisasi.

Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Tetelesi Afia Kecamatan Gunungsitoli Utara



Sumber : Peneliti 2023

4.1.3 Visi dan Misi Desa Tetehosi Afia

a. Visi

Terbangunnya tata kelola Pemerintahan Desa yang baik dan bersih guna mewujudkan Desa Tetehosi Afia yang adil, makmur dan sejahtera.

b. Misi

1. Melakukan reformasi birokrasi di jajaran aparaturnya Pemerintahan Desa guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
2. Menyelenggarakan Pemerintahan yang bersih, terbebas dari korupsi serta bentuk-bentuk penyelewengan lainnya.
3. Pembangunan infrastruktur desa yang merata dan berkesinambungan dengan mengedepankan partisipasi dan gotong royong masyarakat.
4. Mewujudkan terbentuknya BUMDES untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.
5. Meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik dan layak

4.2 Karakteristik Informan Penelitian

Pada bab ini peneliti mengemukakan data penelitian yang merupakan hasil yang peneliti dapatkan di lokasi penelitian, yaitu: Desa Tetehosi Afia Kecamatan Gunungsitoli Utara, khususnya menjelaskan dan menganalisis Intensitas Pemberdayaan masyarakat dalam Pembangunan Jalan Usaha Tani di Desa Tetehosi Afia Kecamatan Gunungsitoli Utara. Data yang disajikan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dijawab sendiri oleh beberapa pihak Informan. Informan penelitian ini terdiri dari 7 orang informan, antara lain : 1 informan kunci yaitu Ketua GAPOKTAN (Gabungan Kelompok Tani) sekaligus ketua kelompok tani yang mengusulkan pembangunan JUT tersebut, 3 orang untuk informan utama yaitu Masyarakat pemilik lahan dan Masyarakat setempat dan 3 orang informan Pendukung terdiri dari Kepala Desa, Kepala Seksi Kesejahteraan dan Kepala Dusun Desa Tetehosi Afia Kecamatan Gunungsitoli Utara.

Pada bab ini peneliti menguraikan pembahasan secara teoritis maupun secara langsung pada objek penelitian. Pada penelitian ini yang menjadi identitas narasumber adalah: nama, usia, pendidikan terakhir dan jabatan. Berikut adalah tabel identitas informan tersebut :

Tabel 4.1
Identitas Informan Kunci

No.	Nama	Usia	Pendidikan Terakhir	Jabatan	Ket
1.	Arosokhi Zega	46 Tahun	SMK	Ketua Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani)	Coding informan 1

Sumber : Peneliti 2023

Tabel 4.2
Identitas Informan Utama

No.	Nama	Usia	Pendidikan Terakhir	Jabatan	Ket
2.	Adieli Zega	64 Tahun	Putus SD	Masyarakat Pemilik Lahan	Coding informan 2
3.	Augusmawati Lase	35 Tahun	SMP	Masyarakat Pemilik Lahan	Coding informan 3
4.	Angerago Zega	51 Tahun	Putus SD	Masyarakat Setempat	Coding informan 4

Sumber : Peneliti 2023

Tabel 4.3
Identitas Informan Pendukung

No.	Nama	Usia	Pendidikan Terakhir	Jabatan	Ket
5.	Fotodo Zega,S.Pd.S D	40 Tahun	S-1	Pj.Kepala Desa	Coding informan 5
6.	Arius Zega, S.E	30 Tahun	S-1	Kepala Seksi Kesejahteraan	Coding informan 6
7.	Ferianus Zega	40 Tahun	SMA	Kepala Dusun	Coding informan 7

Sumber : Peneliti 2023

4.3 Analisis Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, wawancara dilakukan peneliti pada tempat penelitian secara langsung dengan menjumpai informan kunci, informan utama dan informan pendukung yaitu pihak yang mengetahui tentang Analisis Intensitas Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Jalan Usaha Tani di Desa Tetelesi Afia Kecamatan Gunungsitoli Utara.

Data yang diperoleh dari penelitian berupa data wawancara, Akan dipaparkan berupa data sebagai berikut:

1. Kehadiran Pembangunan JUT

“awal mula pembangunan ini yaitu, kami dari kelompok tani mengusulkan pada dinas pertanian pada akhir tahun 2020 mengenai lanjutan Jalan Usaha Tani yang dulu telah dibangun dari dana desa, kemudian ditanggapi oleh bapak kepala Dinas Pertanian lalu menyampaikan kepada bapak WaliKota sehingga pada tahun 2021 seminggu setelah terpilih Walikota, beliau langsung turun lapangan untuk melihat dan melaksanakan pertemuan di dusun Iv Desa Tetelesi Afia Kecamatan Gunungsitoli Utara, Sehingga pembangunan JUT tersebut di ACC. proses pembangunannya berlangsung lama, dimulai dari tanggal 13 juni 2022 dan baru selesai bulan Desember 2022 (coding informan 1, wawancara 15 Agustus 2023)”.

“ya benar, telah terjadi proses pembangunan jalan usaha tani di dusun Iv Tetelesi Afia, dapat kita lihat bersama bentuk yang sudah di bangun dan Saya termasuk pemilik lahan yang dilewati bangunan jalur jalan usaha tani tersebut. Untuk permasalahan, ya ada sedikit persoalan pada saat pembangunan tersebut (coding informan 2, wawancara 09 Agustus 2023)”.

“seperti yang bisa kita lihat di depan rumah telah dilaksanakan pembangunan jalan usaha tani dan itu melewati lahan kami.

Untuk soal masalah pembangunan memang ada, tapi dari pihak kami, kami selalu mendukung adanya pembangunan. (coding informan 3, wawancara 09 Agustus 2023)”.

“sebagai masyarakat setempat dusun Iv desa tetehosi afia, membenarkan bahwa telah terjadi proses pembangunan jalan usaha tani pada tahun 2022 (coding informan 4, Wawancara 15 Agustus 2023)”

“Terkait pembangunan di dusun Iv desa tetehosi afia, benar telah dilaksanakan. dulu sekilas saat saya melewati lokasi pembangunan tersebut, tepatnya sebelum saya Pj. Kepala Desa, saya melihat anggaran tersebut berasal dari dana APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (coding informan 5, Wawancara 11 Agustus 2023)”

“untuk Pembangunan JUT di dusun IV Tetehosi Afia Telah dilaksanakan pada tahun 2022, dana tersebut bukan berasal dari dana desa melainkan dari dana APBD yang dimana dalam kegiatan fisik pembangunan tersebut dilaksanakan oleh tim pelaksana dari pemerintah kota (coding informan 6, Wawancara 08 Agustus 2023)”

“Benar, telah terjadi pembangunan jalan usaha tani di dusun Iv Desa Tetehosi Afia yang dilaksanakan sekitar bulan juli tahun 2022. Untuk dananya berasal dari dana APBD pemerintah Kota (coding informan 7, wawancara 08 Agustus 2023)”

2. Kesepakatan

“Pada bulan Maret 2022 diadakan musyawarah yang dilaksanakan di kantor Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan dihadiri oleh pihak pemerintah dari dinas pertanian, kepala desa terkait, yang

terdiri dari 3 desa antara lain : Desa Tetelesi Afia, Desa Lasara Sowa serta Desa Gawu-gawu Bo'uso, ketua kelompok tani terkait, pihak masyarakat pemilik lahan, masyarakat setempat dan pihak Kontraktor Pelaksana atau biasa disebut pemborong bernama Damili Gea. Dalam musyawarah tersebut terdapat beberapa kesepakatan yang telah dijanjikan oleh pemborong dan disepakati bersama yaitu :

- a. Pada proses pembangunan tersebut mengutamakan pemberdayaan masyarakat (penggunaan tenaga kerja) pemilik lahan dan masyarakat setempat.
- b. Memanfaatkan fasilitas yang ada dilokasi setempat seperti (mobil pengangkut) dan material bangunan yang dimiliki di lokasi tersebut seperti sirtu (pasir batu)
- c. Melaksanakan pembangunan JUT sesuai jalur yang telah di patok atau yang dihibahkan.

Permintaan agar kami bekerja tersebut adalah semata untuk menutupi ganti rugi tanah yang telah dihibahkan demi tujuan bersama, karena tidak ada biaya ganti rugi atas tanah tersebut dan juga supaya kami dapat peluang bekerja untuk bisa membantu perekonomian kami di Dusun Iv Tetelesi Afia. sehingga pada tanggal 11 April 2022 dilaksanakan penandatanganan hibah tanah oleh masyarakat pemilik lahan dan juga kepala desa terkait, yang terdiri dari 3 desa, kemudian diserahkan kepada pihak pemerintah (coding informan 1, wawancara 15 Agustus 2023)".

"Sebelumnya telah dilaksanakan musyawarah yang dihadiri oleh kami dan semua pemilik lahan yang melewati jalur jalan usaha tani tersebut sehingga kami semua setuju dengan kesepakatan yang dijanjikan oleh pemborong bahwa di utamakan pemberdayaan masyarakat setempat atau penggunaan tenaga kerja pemilik lahan setempat dalam kegiatan proses pembangunan tersebut (coding informan 2, wawancara 09 Agustus 2023)".

“sudah dilaksanakan musyawarah yang dihadiri oleh semua pemilik lahan, juga pihak pemborong dan pihak pemerintah desa. Terkait pembangunan tersebut telah disepakati dan dijanjikan oleh pemborong bahwa saat mulai pembangunan nantinya akan diutamakan penggunaan tenaga kerja pemilik lahan setempat (coding informan 3, wawancara 09 Agustus 2023)”.

“saat dilaksanakan musyawarah telah ada kesepakatan yang dijanjikan pemborong kepada pemilik lahan yang diketahui oleh pihak pemerintah yaitu mengutamakan pemberdayaan masyarakat pemilik lahan dan masyarakat setempat, baik itu dari segi tenaga kerja, fasilitas berupa mobil pengangkut bahan, dan material disekitar berupa Sirtu atau pasir batu (coding informan 4, Wawancara 15 Agustus 2023)”

“untuk kesepakatan, sebagai pemerintahan desa kami hanya bersifat mengetahui dan mendukung karena tupoksi kami dalam hal ini terbatas berbeda dengan dana desa yang dilaksanakan oleh tim dari pemerintah desa, dengan membentuk tim pengadaan barang dan jasa, baik dalam pengadaan SDM atau tenaga kerja, pengadaan fasilitas dan bahan (coding informan 6, Wawancara 08 Agustus 2023)”

“sudah diadakan musyawarah sebelum melaksanakan proses pembangunan dan partisipasi masyarakat mendukung. Musyawarah pertama dilaksanakan oleh kelompok tani kemudian diajukan ke dinas Pertanian dan terakhir sebelum dimulai pembangunan, diadakan lagi musyawarah dengan mengundang pemerintah desa, pemerintah kota yang bersangkutan, dan kelompok tani terutama penghibah tanah yang dilaksanakan di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP). dari musyawarah tersebut membuahkan hasil persetujuan dari pihak masyarakat pemilik

lahan dengan syarat mengutamakan pemberdayaan masyarakat atau penggunaan tenaga kerja pemilik lahan dan masyarakat setempat dalam proses pembangunan JUT tersebut (coding informan 7, wawancara 08 Agustus 2023)”

3. Pemenuhan kesepakatan dan kontrak

“Pada tanggal 13 juni 2022, kontraktor pelaksana bernama Damili Gea memulai kegiatan proses Pembangunan tersebut namun, tenaga kerja yang ia gunakan adalah tenaga kerja dari luar daerah yaitu tenaga kerja dari desa Nazalou yang tidak berkaitan dalam rencana pembangunan atau bukan pemilik lahan maupun masyarakat setempat yang telah disepakati. saya pridadi, selaku ketua kelompok tani penanggungjawab yang menggerakkan dari awal dalam mengusulkan pembangunan jalan usaha tani tersebut belum mendapat informasi ataupun koordinasi dari kontraktor pelaksana bahwa proses pembangunan akan dimulai dihari tersebut. banyak laporan dari masyarakat bahwa jalur jalan yang dibangun berubah atau tidak sesuai dengan jalur yang telah dihibahkan dan juga fasilitas (mobil pengangkut) dan material (sirtu) yang dimiliki masyarakat sekitar lokasi pembangunan, tidak dimanfaatkan oleh kontraktor pelaksana. bahkan waktu itu dalam proses pembangunan tersebut, kontraktor pelaksana memunculkan bangunan parit gendong yang tidak termuat dalam gambar perencanaan, akibatnya panjang jalan usaha tani yang dibangun, dikurangi karena kurangnya biaya. buktinya ada sekitar 15 meter lagi lahan yang sudah digali tapi belum dibangun sampai sekarang (coding informan 1, wawancara 15 Agustus 2023)”.

“pelaksanaan yang dilakukan oleh pemborong tidak sesuai dengan harapan masyarakat, pada kenyataannya pemborong mendatangkan pekerja dari luar daerah, sedangkan hanya sedikit masyarakat pemilik lahan yang dipekerjakan termasuk saya dan

itupun tidak berlangsung lama, Bahan material (sirtu) kami juga tidak di manfaatkan sehingga menimbulkan permasalahan (coding informan 2, wawancara 09 Agustus 2023)”.

“Dalam pelaksanaannya ada yang sesuai dan ada juga yang tidak sesuai. Hal yang paling tidak sesuai adalah diutamakan atau mendatangkan pekerja dari luar dan terkadang pemilik lahan tidak dipekerjakan sehingga menjadi masalah waktu itu (coding informan 3, wawancara 09 Agustus 2023)”.

“semuanya tidak sesuai dengan kesepakatan tersebut termasuk jalur jalan yang dibangun, diubah secara sepihak oleh pemborong sehingga menimbulkan banyak protes dari masyarakat (coding informan 4, Wawancara 15 Agustus 2023)”

“Untuk target waktu, Biasanya secara umum paling lama proses pembangunan 3 bulan diselesaikan. Sebagai tugas pokok dan fungsi pemerintah desa dalam hal ini yaitu mendukung penuh pembangunan tersebut dan juga memotivasi masyarakat agar pembangunan tersebut dijaga demi kepentingan bersama (coding informan 5, Wawancara 11 Agustus 2023)”

“target penyelesaian sekitar 2 bulan lebih. Tugas pokok dan fungsi pemerintah desa khususnya sebagai kepala dusun dalam hal ini hanya mengawasi proses kegiatan pembangunan tersebut (coding informan 7, wawancara 08 Agustus 2023)”

4. Proporsi Tenaga kerja lokal yang tidak sesuai

“pemilik lahan sempat di pekerjakan namun tidak lama, ada yang hanya dua hari, tiga hari, seminggu. Selanjutnya, bagi mereka yang bertahan, upah mereka ditekan rendah agar mereka tidak

bekerja lagi sedangkan pekerja dari luar tetap bekerja (coding informan 1, wawancara 15 Agustus 2023)”.

“saya bekerja disitu hanya 3 (tiga) hari sedangkan pekerja dari luar daerah, tetap bekerja sampai bangunan itu selesai (coding informan 2, wawancara 09 Agustus 2023)”.

“Tenaga kerja yang pertama di pekerjakan adalah kebanyakan orang luar. memang saat itu kami sudah bekerja tapi tidak selamanya, kami bergantian dengan alasan terlalu banyak tenaga kerja sedangkan pekerja dari luar tetap untuk bekerja (coding informan 3, wawancara 09 Agustus 2023)”.

“kami baru dipekerjakan oleh pemborong setelah banyak permasalahan yang terjadi di lapangan walaupun tidak lama tapi kami terima saja karena kami sebenarnya sangat mendukung pembangunan dan kami juga butuh pekerjaan (coding informan 4, Wawancara 15 Agustus 2023)”

5. Kualifikasi Pekerja

“Ada banyak masyarakat yang bisa dan mampu menjadi tukang ataupun kernet di dusun Iv desa Tetehosi Afia tetapi kontraktor pelaksana tidak memanfaatkannya malah mendatangkan pekerja luar (coding informan 1, wawancara 15 Agustus 2023)”.

“Kami pernah ditolak, karena saya merasa sudah tua untuk kerja memungkinkan alasan ditolak, saya pun mengajukan anak saya untuk menggantikan saya tapi tetap saja ditolak, katanya nanti saya kabarkan waktu untuk kalian kerja lagi dan kami pun menunggu informasi tersebut tapi tidak pernah ada. Nah untuk tukang, ada masyarakat setempat yang bisa tukang bangunan di

sini tapi pemborong tidak mau mempekerjakannya (coding informan 2, wawancara 09 Agustus 2023)”.

Kalau masyarakat setempat disini ada yang mahir tukang (coding informan 3, wawancara 09 Agustus 2023)”.

“Banyak masyarakat yang mahir tukang dan kernet disini. Terkait fasilitas pengangkut bahan material, juga terdapat beberapa masyarakat setempat memiliki mobil pengangkut yang membutuhkan pekerjaan, akan tetapi pemborong tidak memberikan kesempatan malah mendatangkan mobil pengangkut bahan dari luar. (coding informan 4, Wawancara 15 Agustus 2023)”

Untuk masyarakat profesi tukang di dusun Iv desa Tetelesi Afia, ada (coding informan 7, wawancara 08 Agustus 2023)”.

6. Reaksi dan Tanggapan Masyarakat

“masyarakat pemilik lahan setempat sangat kecewa pada saat itu karena mereka tidak dipekerjakan, dan yang menjadi sorotan pertama mereka adalah saya, karena saya yang mempertanggungjawabkan dan mengusulkan pembangunan tersebut. Terkait perubahan jalur pembangunan jalan usaha tani tersebut juga memicu aksi perlawanan dari masyarakat yang meminta biaya ganti rugi atas lahan yang dibangun karena tidak sesuai dengan jalur utama pada surat hibah, padahal di kesepakatan awal tidak ada biaya ganti rugi. dikarenakan semakin banyak permasalahan juga sorotan masyarakat kepada saya dan tidak ada koordinasi dari pihak kontraktor pelaksana makanya, saya dan saudara saya a.n A.Z(coding informan 4) menghalangi jalur jalan menuju lokasi pembangunan tersebut menggunakan batu. kejadian tersebut menyebabkan kami di berikan surat

panggilan dari kantor camat dan kantor dinas pertanian, sehingga diturunkan pamong praja untuk memindahkan batu tersebut. Oleh karena itu, kami juga melayangkan surat laporan kepada Bapak Walikota, Kapolsek Alo'oa, Dinas Pertanian, Dinas PU, Camat, begitu juga Kepala Desa, terkait masalah pembangunan yang tidak sesuai kesepakatan hasil musyawarah dari awal yang dilakukan oleh kontraktor pelaksana (coding informan 1, wawancara 15 Agustus 2023)".

"di lahan saya pada saat itu saya izinkan tapi dilokasi lahan lain banyak yang keberatan dan protes karena jalur yang di patok dan disepakati dari awal dirubah oleh pemborong, makanya banyak yang tidak mengizinkan (coding informan 2, wawancara 09 Agustus 2023)".

"kami sangat kecewa dengan perbuatan pemborong saat itu, tapi kami tidak berniat mengacaukan pekerjaan itu. demi tujuan awal kami, agar jalan kami disini bagus karena kami sangatlah butuh pembangunan jalan usaha tani tersebut (coding informan 3, wawancara 09 Agustus 2023)".

"Dalam pembangunan ini kami sangat kecewa dan berkecil hati kepada pemborong karena lebih mementingkan atau mengutamakan orang luar, baik dari segi fasilitas pengangkutan bahan, juga tenaga kerja, dibandingkan masyarakat pemilik lahan, masyarakat setempat dan bahkan ketua kelompok tani yang membantu memperjuangkan atau mengusulkan pembangunan tersebut tidak dihiraukan. Seharusnya kami menjadi perhatian utama pemborong karena kami juga ingin bekerja. Makanya pada saat itu saya bersama saudara saya, menghalang jalur jalan menuju lokasi pembangunan tersebut dengan meletakkan batu. kejadian tersebut menyebabkan kami di berikan surat panggilan

dari kantor camat dan kantor dinas pertanian, sampai diturunkan pamong praja untuk memindahkan batu tersebut (coding informan 4, Wawancara 15 Agustus 2023)”

“terkait masalah proses pembangunan jalan usaha di dusun Iv Desa Tetelesi Afia, benar telah terjadi dan ada bentuk tindakan perlawanan dari masyarakat. “Perlawanan tersebut berupa peletakan batu ditengah jalur jalan menuju lokasi tempat pembangunan yang menyebabkan kesulitan untuk keluar-masuk bahan material dan juga adanya bentuk surat pengaduan masyarakat kepada kami pihak pemerintah desa (coding informan 7, wawancara 08 Agustus 2023)”.

7. Pengaruh Stakeholder (Pemangku Kepentingan)

“kami diberikan surat panggilan dari kantor camat dan kantor dinas pertanian, sehingga diturunkan pamong praja untuk memindahkan batu yang telah kami letakkan di jalur jalan menuju tempat pembangunan. Terkait laporan yang sudah kami sampaikan juga, sampai sekarang belum ada tanggapan dari pemerintah yang membuat efek jera bagi kontraktor pelaksana atau pemborong (coding informan 1, wawancara 15 Agustus 2023)”.

“tindakan pemerintah saat itu mengadakan kembali pertemuan rapat pemilik lahan untuk bisa dibijaksanakan kembali sehingga karena kami juga tidak ingin kehilangan pembangunan makanya kami mengizinkan untuk dilanjutkan kembali. (coding informan 2, wawancara 09 Agustus 2023)”.

“pemerintah desa dan kota telah ikut serta turun lapangan untuk menyelesaikan masalah tersebut dan melanjutkan kembali proses pembangunan (coding informan 7, wawancara 08 Agustus 2023)”

4.4 Deskripsi Hasil Penelitian

Peneliti akan menguraikan hasil observasi dan wawancara penelitian di lapangan berdasarkan judul penelitian Analisis Intensitas Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Jalan Usaha Tani di Desa Tetelesi Afia Kecamatan Gunungsitoli Utara. Hasil penelitian ini diperoleh melalui teknik pengumpulan data dengan wawancara, teknik tersebut dilakukan untuk memperoleh data yang alamiah. Struktur wawancara yang peneliti rancang bukan merupakan pedoman yang baku, jadi apabila jawaban yang diberikan informasi kurang jelas atau tidak sesuai dengan topik pembicaraan, maka peneliti mengajukan pertanyaan lain agar jawaban yang diberikan bisa lebih jelas saat mereka menjabarkan, kemudian memfilter informasi tersebut untuk menyesuaikan dengan topik pembicaraan, maka peneliti dapat menganalisa.

4.4.1 Kesepakatan dalam Pembangunan Jalan Usaha Tani di Dusun Iv

Tetelesi Afia

Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) di Dusun Iv Desa Tetelesi Afia Kecamatan Gunungsitoli Utara, adalah salah satu upaya pemerintah dalam mendukung perekonomian masyarakat. Jalan usaha tani atau jalan pertanian merupakan prasarana transportasi pada kawasan pertanian (tanaman pangan, perkebunan rakyat, dan peternakan) untuk memperlancar mobilitas alat dan mesin pertanian, pengangkutan sarana produksi menuju lahan pertanian, dan mengangkut hasil produk pertanian dari lahan menuju tempat penyimpanan, tempat pengolahan, atau pasar. Agar terwujudnya pembangunan jalan usaha tani yang terlaksana dengan baik, maka perlumasyarakat terlebih dahulu.

Menurut Syamzan Syukur (2013:133) dalam Ariyani, 2022, musyawarah dapat berarti nasehat, perundingan pikiran, konsiderans permufakatan atau konsultasi dengan cara meminta nasehat/pendapat kepada orang lain untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, sedangkan mufakat menurut Fuad Wasitaatmadja dalam Arum adalah suatu kesepakatan yang dihasilkan oleh para peserta

musyawarah dalam rangka memecahkan masalah, berupa pendapat-pendapat yang telah disetujui dari pihak-pihak yang terdapat dalam kegiatan musyawarah.

Berdasarkan hasil wawancara, pada bulan maret 2022 telah dilaksanakan musayarah yang dilaksanakan di kantor Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan dihadiri oleh pihak pemerintah dari dinas pertanian, kepala desa terkait, yang terdiri dari 3 desa antara lain : Desa Tetehosi Afia, Desa Lasara Sowu, Desa Gawu-gawu Bo'uso, ketua kelompok tani terkait, pihak masyarakat pemilik lahan, masyarakat setempat dan pihak Kontraktor Pelaksana atau sering disebut pemborong bernama Damili Gea.

Dalam musyawarah tersebut terdapat beberapa kesepakatan yang telah disepakati bersama yaitu :

1. Pada proses pembangunan tersebut mengutamakan pemberdayaan masyarakat (penggunaan tenaga kerja) pemilik lahan dan masyarakat setempat.
2. Memanfaatkan fasilitas yang ada dilokasi setempat seperti (mobil pengangkut) dan material bangunan yang dimiliki di lokasi tersebut seperti sirtu (pasir batu)
3. Melaksanakan pembangunan JUT sesuai jalur yang telah di patok atau yang dihibahkan.

Kesepakatan tersebut berdasar untuk menutupi ganti rugi tanah yang telah dihibahkan demi tujuan bersama karena tidak ada biaya ganti rugi atas tanah yang telah dihibahkan dan juga untuk bisa membantu perekonomian masyarakat. Sehingga berlanjut pada tanggal 11 April 2022 dilaksanakan penandatanganan hibah tanah oleh masyarakat pemilik lahan dan juga kepala desa terkait.

4.4.2 Intensitas Pemberdayaan Masyarakat Lokal

Intensitas pemberdayaan masyarakat merujuk pada tingkat atau derajat di mana suatu masyarakat diberdayakan atau memberdayakan dirinya sendiri secara aktif dalam mengelola sumber daya, mengambil keputusan, dan mengambil bagian dalam proses pembangunan dan perubahan sosial.

Intensitas pemberdayaan masyarakat juga mencerminkan sejauh mana masyarakat memiliki akses, partisipasi, dan kontrol atas sumber daya fisik, sosial, ekonomi, dan politik yang ada. Hal ini melibatkan penguatan individu dan kelompok dalam masyarakat untuk mengatasi hambatan dan ketidaksetaraan yang mungkin mereka hadapi.

Teori Pemberdayaan Masyarakat menurut Jim Ife dalam Maarif, 2021 menjelaskan bahwa definisi pemberdayaan ialah memberikan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan kepada warga untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depan mereka sendiri dan berpartisipasi pada upaya mempengaruhi kehidupan dari kelompoknya.

Menurut hasil observasi di lapangan, Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Lokal di Dusun Iv Desa Tetelesi Afia dalam pembangunan Jalan Usaha Tani sangat rendah, disebabkan karna ketidaksesuaian pelaksanaan terhadap kesepakatan yang telah disepakati oleh pemborong atau kontraktor pelaksana

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada masyarakat sebagai sumber data, dalam pengumpulan data yakni : informan kunci, informan utama, dan informan pendukung, ternyata :

- a. rendahnya/kurangnya komunikasi dan koordinasi yang baik dari pihak kontraktor pelaksana kepada ketua kelompok tani selaku yang mengusulkan pembangunan jalan usaha tani tersebut
- b. Penggunaan tenaga kerja setempat terutama pemilik lahan di dusun Iv desa tetelesi afia sangat rendah, dapat dilihat dari jumlah harian kerja yakni ada yang 2 hari, 3 hari dan seminggu, dari kurang lebih 6 bulan masa proses pembangunan sedangkan tenaga kerja luar daerah tetap bekerja sampai selesai.
- c. fasilitas (mobil pengangkut) yang dimiliki masyarakat sekitar lokasi pembangunan baru dimanfaatkan setelah adanya protes juga pengaduan dari masyarakat sedangkan material (sirtu) yang dimiliki masyarakat sekitar lokasi pembangunan, sama sekali tidak dimanfaatkan oleh kontraktor pelaksana

4.4.3 Dampak Perubahan secara Sepihak

Perubahan kesepakatan merujuk pada modifikasi atau revisi terhadap kesepakatan atau perjanjian yang telah ada antara pihak-pihak yang terlibat. Kesepakatan dapat berupa perjanjian formal, kontrak, atau pemahaman yang telah disepakati sebelumnya.

perubahan kesepakatan secara sepihak dapat berujung pada sengketa atau tindakan hukum antara pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penting untuk menjaga komunikasi yang jelas dan terbuka dalam rangka untuk menghindari perubahan kesepakatan secara sepihak yang tidak diinginkan dan menghormati prinsip saling menguntungkan dalam hubungan bisnis atau kontrak lainnya.

Herskovitch dalam Nuri, 2022 mendefinisikan resistensi terhadap perubahan sebagai perilaku seseorang yang dimaksudkan untuk menghindari perubahan dan atau mengganggu suksesnya penerapan perubahan dalam bentuk tertentu. resistensi terhadap perubahan merupakan resistensi terhadap kehilangan pada suatu yang berharga atau kehilangan yang diketahui dengan berpindah ke yang tidak diketahui. Resistensi terhadap perubahan juga terkait dengan perlawanan yang dilakukan karena adanya kekhawatiran akan kehilangan sesuatu yang berharga dan sudah diketahui sebelumnya, dan akan digantikan dengan sesuatu yang baru yang belum diketahui (Yilmaz & Kilicoglu, 2013)

Berdasarkan hasil wawancara dari coding informan 1-7 di dusun Iv Desa Tetelesi Afia terdapat beberapa perubahan secara sepihak oleh kontraktor pelaksana yaitu :

- a. Perubahan jalur jalan usaha tani yang tidak sesuai dengan jalur yang telah dihibahkan
- b. fasilitas (mobil pengangkut) dan material (sirtu) yang dimiliki masyarakat sekitar lokasi pembangunan tidak dimanfaatkan oleh kontraktor pelaksana.
- c. kontraktor pelaksana memunculkan bangunan parit gendong yang tidak termuat dalam gambar perencanaan, akibatnya panjang jalan usaha tani

yang dibangun dikurangi karena kurangnya biaya. buktinya menurut informan kunci, ada sekitar 15 meter lagi lahan yang sudah digali tapi belum dibangun sampai sekarang.

Selanjutnya ada bentuk perlawanan atau resistensi dari masyarakat sebagai dampak perubahan secara sepihak oleh kontraktor pelaksana yaitu:

1. terjadi aksi protes dan perlawanan dari masyarakat yang meminta biaya ganti rugi atas lahan yang dibangun karena tidak sesuai dengan jalur utama pada surat hibah.
2. jalur jalan menuju lokasi pembangunan tersebut dihalang oleh masyarakat dengan meletakkan batu
3. adanya surat laporan pengaduan dari masyarakat kepada pihak pemerintah dan pihak berwajib.
4. terkait semua permasalahan yang terjadi dilapangan mengakibatkan proses pembangunan berlangsung lama, sekitar kurang lebih 6 bulan yang artinya melebihi target penyelesaian secara umum.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilaksanakan di Dusun IV Desa Tetehosi Afia Kecamatan Gunungsitoli Utara, tentang menganalisis intensitas pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan jalan usaha tani, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- a. Intensitas pemberdayaan masyarakat lokal di dusun Iv desa tetehosi afia kecamatan gunungsitoli utara sangat rendah. dapat dilihat dari rendahnya jumlah harian tenaga kerja setempat terutama pemilik lahan yakni ada yang 2 hari, 3 hari dan seminggu, dari kurang lebih 6 bulan masa proses pembangunan sedangkan tenaga kerja luar daerah tetap bekerja sampai selesai, serta kurangnya komunikasi dan koordinasi yang baik dari pihak kontraktor pelaksana kepada ketua kelompok tani selaku yang mengusulkan pembangunan jalan usaha tani tersebut.
- b. Mekanisme Pembangunan jalan usaha tani di dusun Iv desa tetehosi afia kecamatan Gunungsitoli utara, awalnya berasal dari dana APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah kota, bukan dari dana desa. diusulkan oleh masyarakat petani bersama dengan ketua kelompok tani penanggungjawab melalui pihak pemerintah dinas pertanian sehingga dimulai pada tanggal 13 juni 2022. Sebelum terjadinya proses pembangunan, telah dilaksanakan musyawarah terlebih dahulu, yang dihadiri oleh pihak pemerintah terkait, ketua kelompok tani terkait, pihak masyarakat pemilik lahan, masyarakat setempat dan pihak Kontraktor Pelaksana sehingga menghasilkan beberapa kesepakatan yang telah disepakati bersama, Namun pada kenyataannya kesepakatan tersebut tidak dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana. dapat dibuktikan pada saat di mulai pembangunan, hal yang terjadi yakni: Minimnya pemberdayaan masyarakat lokal dan mengutamakan tenaga kerja luar daerah,

Perubahan jalur jalan usaha tani yang tidak sesuai dengan jalur yang telah dihibahkan, fasilitas mobil pengangkut dan material sirtu yang dimiliki masyarakat sekitar lokasi pembangunan tidak dimanfaatkan oleh kontraktor pelaksana. akibatnya, terjadi aksi protes dan perlawanan dari masyarakat yang meminta biaya ganti rugi atas lahan yang dibangun karena tidak sesuai dengan jalur utama pada surat hibah, jalur jalan menuju lokasi pembangunan tersebut dihalang oleh masyarakat dengan meletakkan batu, adanya surat laporan pengaduan dari masyarakat kepada pihak pemerintah dan pihak berwajib, dan terkait semua permasalahan yang terjadi dilapangan mengakibatkan proses pembangunan berlangsung lama, sekitar kurang lebih 6 bulan yang artinya melebihi target penyelesaian pembangunan secara umum.

- c. Pemerintah dalam menyikapi permasalahan dalam pembangunan Jalan Usaha Tani di Desa Tetehosi Afia Kecamatan Gunungsitoli Utara yang tidak sesuai dengan kesepakatan adalah memberikan surat panggilan kepada pihak masyarakat yang meletakkan batu pada jalur jalan menuju lokasi pembangunan, turun lapangan langsung dan melihat keadaan yang terjadi di lokasi pembangunan serta membawa satpol pp untuk memindahkan batu yang menghalangi jalur jalan pembangunan tersebut, dan melaksanakan rapat bersama masyarakat pemilik lahan sehingga kontraktor pelaksana melanjutkan kembali pembangunan dengan memberdayakan tenaga kerja lokal walaupun tidak berlangsung lama dan tetap menggunakan tenaga kerja luar daerah

5.2 Saran

Saran dari peneliti adalah :

- a. Diharapkan kepada pemerintah di desa tetehosi afia kecamatan gunungsitoli utara, intensitas pemberdayaan masyarakat lokal/setempat lebih ditingkatkan lagi agar masyarakat dapat berperan aktif dalam mengelola sumber daya, mengambil keputusan dan mengambil bagian dalam proses pembangunan untuk mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik sehingga meminimalisir terjadinya konflik yang terjadi dilokasi pembangunan.
- b. Mekanisme pembangunan di desa tetehosi afia kecamatan gunungsitoli utara dimasa yang akan datang, diharapkan kepada pemerintah agar disesuaikan dengan mufakat atau hasil musyawarah yang telah disepakati bersama, untuk menghindari resistensi masyarakat berupa aksi perlawanan yang meminta biaya ganti rugi, aksi menghalangi lancarnya proses pembangunan dan laporan pengaduan yang menjadi kesan buruk dalam kinerja pemerintah. Sehingga proses pembangunan dapat terselesaikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.
- c. Dihimbau kepada pemerintah agar memberikan sanksi tegas kepada pihak kontraktor pelaksana yang terbukti tidak kompeten atau tidak melaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama dalam menjalankan proses pembangunan, agar mendapat efek jera dan tidak semena-mena sehingga tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah tidak menurun.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyani, R. (2022, December 19). *Pengertian Musyawarah Menurut Para Ahli*. Retrieved mei 9, 2023, from rikaariyani:
<https://www.rikaariyani.com/2022/12/pengertian-musyawah-menurut-para-ahli>
- Arum, R. (n.d.). *Pengertian Musyawarah Mufakat disertai Nilai-nilai Yang Terkandung Didalamnya*. Retrieved mei 9, 2023, from gamedia:
<https://www.gamedia.com/literasi/musyawah-mufakat>
- Bappeda. (2017, februari 16). *Definisi Pembangunan Fisik Dan Pembangunan Non Fisik Di Dalam Kehidupan Masyarakat*. Retrieved from bappeda.
- Elpisah. (2022). *Pengantar Ekonomi Makro*. Widina .
- Erlisa, T. (2018). Analisis Pelaksanaan Program Kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) Desa Koto Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.
- Leiwakabessy, I. M. (2021). *PEMBERDAYAAN MASYARAKAT LOKAL. Pengabdian Masyarakat*, 36.
- Maarif, S. D. (2021, maret 29). *Mengenal Teori Pemberdayaan Masyarakat Menurut Para Ahli*. Retrieved 10 mei, 2023, from tirto:
<https://tirto.id/mengenal-teori-pemberdayaan-masyarakat-menurut-para-ahli-gbyu>
- Mujahiddin. (2022). *Diskursus Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan; Dari Orde Baru hingga Pascareformasi*. umsu press.
- Nuri, F. (2022). Pemimpin Transformasional Terhadap Resistensi Perubahan di masa pandemi. *Sinomika*, 139.
- Oktoliya, N. S. (2021). Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Peternakan Sapi Perah di Kampung Susu Lawu Kelurahan Sarangan Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan. *agama dan Perubahan Sosial*, 175-204.
- Pemerintahan, B. (2019, desember 10). *Presiden Jokowi Dorong Sektor Pertanian dan Perikanan Sentuh Pasca Produksi*. Retrieved mei 9, 2023, from kominfo: <https://www.kominfo.go.id/content/detail/23209/presiden-jokowi-dorong-sektor-pertanian-dan-perikanan-sentuh-pasca-produksi/0/berita>

- Ramadani, D. M. (2020). UPAYA PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN. *Ilmu Pemerintahan*, 677-690.
- Rasonna. (2015). **PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA SUKA DAME KECAMATAN KUTALIMBARU KABUPATEN DELI SERDANG** .
- Sulaeman, E. S. (2020). *Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan*. Gadjah Mada University Press.
- Trisnawati. (2019). Analisis Upah Pekerja Industri Olahan Singkong ngaglik Salatiga dengan Pendekatan Stolper-Samuelson. *Buletin Studi Ekonomi*.
- Burke, W.W. (2008). *Perubahan organisasi: Teori dan praktek*. London: Bijak.
- Kreitner, R. & Kinicki, A. (2010). *Perilaku Organisasi (Edisi Kesembilan)*. New York: McGraw-Hill Irwin.
- Pratama, E. (2022). *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Potensi Ekowisata Pantai Ketaping Di Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat* (Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).
- Susilowati, E. Z., & Indarti, T. (2019). Resistensi perempuan dalam kumpulan cerita tandak karya royyan julian (Teori resistensi-James C. Scott). *Jurnal Bapala. jurnalmahasiswa.unesa.ac.id. Surabaya: JBSI FBS Universitas Negeri Surabaya*.
- Alfa, A., & Kinanda, R. (2019). Kajian Literatur Resistensi Dalam Pengambilan Kebijakan Pembangunan Serta Usulan Strategi Dalam Menghadapi Resistensi Kebijakan Pembangunan Oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. *Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir*, 5(3), 187-187.
- Hajar, Siti, dkk. 2018. *Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Pesisir*. Mendan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli.
- Amalia, Nabila Ridha. *Pemberdayaan Masyarakat Singosari Melalui Budidaya Tanaman Bunga Anggrek Di Singosari Malang (Studi Pada Kelompok Petani Plasma di Desa Gunungrejo Singosari Malang)*. Diss. Universitas Muhammadiyah Malang, 2023.

³ Friedmann.1992. *Empowerment: The Politics of Alternative Development*.Cambridge: Blacwell

³ Prijono, Onny S. Dan Pranarka, A.M.W. 1996. *Pemberdayaan, Dan Konsep,Kebijakan Dan Implentasi*. Jakarta: Cides.

³ Sutrisno R. 2005. *Pemberdayaan Masyarakat Dan Upaya Pembebasan Kemiskinan*. Yogyakarta: Philosophy Press Universitas Gadjah Mada.

² Legge, J.G. 2003. *Kaum Intelektual dan Perjuangan Kemerdekaan*. Jakarta : Grafiti.

² Ndraha, Talizuddin. 2007. *Pengertian Desa dan Pembangunan Desa*. Jakarta : Yayasan Karya Darma II.

² Siagian, Sondang P. 2007. *Adminsitrasi Pembangunan*. Jakarta : Gunung Agung

DRAF WAWANCARA

1. Apakah ada masalah yang terjadi dalam proses pembangunan JUT di ¹² dusun IV desa tetehosi afia kecamatan gunungsitoli utara?
2. sebagai (masyarakat pemilik lahan tanah, masyarakat setempat, ketua kelompok tani, kepala desa, kepala ¹² dusun) Apakah anda setuju dalam pelaksanaan pembangunan JUT di ¹² dusun IV desa tetehosi afia kecamatan gunungsitoli utara?
3. Apakah telah dilaksanakan musyawarah terlebih dahulu sebelum melaksanakan pembangunan JUT di desa tetehosi afia kecamatan gunungsitoli utara?
4. Siapa sajakah yang menghadiri musyawarah terkait pembangunan JUT tersebut?
5. Apakah ada mufakat/kesepakatan terkait hasil musyawarah tersebut, baik antara masyarakat pemilik lahan tanah, kontraktor pelaksana dan pemerintah sebagai pihak yang mengetahui?
6. Apakah isi dari kesepakatan yang terjadi antara pemilik lahan tanah, kontraktor pelaksana dan pemerintah sebagai pihak yang mengetahui?
7. Apakah proses pelaksanaan Pembangunan JUT sepenuhnya sesuai dengan hasil musyawarah yang sebelumnya telah disepakati bersama atau malah terjadi perubahan secara sepihak oleh kontraktor pelaksana?
8. Menurut pengamatan anda, apakah kontraktor pelaksana mengutamakan pemberdayaan masyarakat pemilik lahan tanah dan masyarakat setempat dalam proses pembangunan tersebut atau tidak?
9. Apakah tidak ada masyarakat setempat yang mampu atau ahli (tukang bangunan, kernet, dll) dalam kegiatan pembangunan JUT tersebut sehingga kontraktor pelaksana memberdayakan tenaga kerja luar?
10. Sebagai (pemilik lahan tanah, masyarakat setempat, ketua kelompok tani “fariawo” selaku pemberi usulan pembangunan), apakah anda telah dipekerjakan sebelum terjadinya masalah dalam proses pembangunan JUT oleh kontraktor pelaksana?

11. Sebagai (pemilik lahan tanah, masyarakat setempat, ketua kelompok tani “fariawo” selaku pemberi usulan pembangunan), apakah tanggapan anda terkait perubahan yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal dalam proses pembangunan JUT oleh kontraktor pelaksana?
12. Apakah pernah terjadi kekeliruan/keributan di lokasi pembangunan JUT tersebut?
13. Apakah bentuk tindakan perlawanan masyarakat yang anda ketahui terkait masalah proses pembangunan JUT tersebut?
14. Apakah pihak pemerintah yang bersangkutan, menanggapi masalah dalam proses pembangunan JUT tersebut?
15. Apakah tindakan atau kebijakan yang dilakukan pemerintah terkait masalah tersebut?
16. Sebagai masyarakat penerima manfaat, apakah anda merasakan manfaat setelah terjadinya pembangunan JUT tersebut?
17. Apakah ada saran anda kepada pemerintah terkait masalah proses pembangunan JUT, agar kedepannya dapat terlaksana dengan baik?

"ANALISIS INTENSITAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN JALAN USAHA TANI DI DESA TETEHO SI AFIA KECAMATAN GUNUNGSITOLI UTARA"

ORIGINALITY REPORT

23%

SIMILARITY INDEX

23%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	4%
2	repository.uma.ac.id Internet Source	4%
3	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	3%
4	repository.unibos.ac.id Internet Source	2%
5	amp.tirto.id Internet Source	2%
6	portal.fisip-unmul.ac.id Internet Source	1%
7	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	1%
8	core.ac.uk Internet Source	1%

publication.umsu.ac.id

9	Internet Source	1 %
10	konsultasiskripsi.com Internet Source	1 %
11	download.garuda.ristekdikti.go.id Internet Source	1 %
12	gunungsitolikota.go.id Internet Source	1 %
13	elibrary.unikom.ac.id Internet Source	1 %
14	repository.nusaputra.ac.id Internet Source	1 %

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches < 1%

"ANALISIS INTENSITAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN JALAN USAHA TANI DI DESA TETEHOSI AFIA KECAMATAN GUNUNGSITOLI UTARA"

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18

PAGE 19

PAGE 20

PAGE 21

PAGE 22

PAGE 23

PAGE 24

PAGE 25

PAGE 26

PAGE 27

PAGE 28

PAGE 29

PAGE 30

PAGE 31

PAGE 32

PAGE 33

PAGE 34

PAGE 35

PAGE 36

PAGE 37

PAGE 38

PAGE 39

PAGE 40

PAGE 41

PAGE 42

PAGE 43

PAGE 44

PAGE 45

PAGE 46

PAGE 47

PAGE 48

PAGE 49

PAGE 50

PAGE 51

PAGE 52

PAGE 53

PAGE 54

PAGE 55

PAGE 56

PAGE 57

PAGE 58

PAGE 59

PAGE 60

PAGE 61

PAGE 62

PAGE 63

PAGE 64

PAGE 65

PAGE 66

PAGE 67

PAGE 68
